

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia

Edisi 60/JANUARI-APRIL/2013

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

ARSIP DAN MANAJEMEN BENCANA DI NEGERI CINCIN API



Ayo ke...

DIORAMA SEJARAH PERJALANAN BANGSA



“Wahana pembelajaran sejarah
sejak masa kejayaan nusantara
sampai masa reformasi”

JAM BERKUNJUNG :

SENIN - JUMAT : 09.00 - 15.00 WIB

SABTU - MINGGU : 09.00 - 13.00 WIB

KECUALI HARI LIBUR NASIONAL



**PUTRI AYUDYA
ARTIS**

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta 12560
Telp : 021 7805851, Fax : 021 7810280 - 7805812
www.anri.go.id, info@anri.go.id

DAFTAR ISI



5 SELAMATKAN ARSIP MILIK NEGARA DARI BENCANA BANJIR!

Beberapa peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia, memperlihatkan arsip sebagai salah satu aset kekayaan negara sangat rentan terkena imbas bencana. Belum banyak kesadaran dari penyelenggara negara untuk menyelamatkan arsip milik negara dari ancaman bencana. Ini bisa dibuktikan dari minimnya lembaga negara yang menyiapkan mitigasi bencana terhadap arsip.

DARI REDAKSI _____ 4

Ina Mirawati : _____ 18

BENCANA PERANG DARI ARSIP FILM HINGGA ARSIP FOTO

Dharwis Widya Utama Yacob : _____ 22

BELAJAR MENGATASI BANJIR DARI HERMAN VAN BREEN

Tyanti Sudarani : _____ 26

GEMPA BUMI DI NEGERI CINCIN API

R. Suryagung SP : _____ 30

MENGAUK MISTERI MELETUSNYA GUNUNG KRAKATAU 1883 MELALUI ARSIP

Kris Hapsari & Nia Pertiwi : _____ 34

BENCANA KELAPARAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN DALAM KHAZANAH ARSIP



10 Tuti Sri Widayanti : PENDOKUMENTASIAN ARSIP BENCANA UPAYA MENGETAHUI POLA PENANGGULANGAN BENCANA

Lembaga-lembaga penanggulangan bencana sebagai lembaga negara berkewajiban untuk menghasilkan arsip yang merekam kegiatan atau peristiwa penanggulangan bencana dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip yang dihasilkan perlu dikelola, baik ketika masih arsip dinamis maupun arsip statisnya.

Mudanto Pamungkas : _____ 38

DINAMIKA KAWASAN PERBATASAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT

Achmad Dedi Faozi : _____ 42

BELAJAR 'KEGAGALAN' DARI NEGERI MATAHARI TERBIT

Profil Task Force ANRI : _____ 45

GARDA DEPAN ANRI DALAM MENYELAMATKAN ARSIP DARI BENCANA

Lufi Herawan : _____ 48

AUGMENTED REALITY (AR) DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Kris Hapsari : _____ 52

TITIK BATAS KERINDUAN

LIPUTAN _____ 55



13 Azmi PENANGGULANGAN KERUSAKAN ARSIP AKIBAT BENCANA BANJIR

Untuk memahami permasalahan kerusakan arsip ketika terjadi bencana banjir, kita perlu memahami secara mendalam apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan arsip apabila terjadi musibah banjir. Apabila kita tidak berupaya menggali lebih jauh penyebab utama (*fundamental problem*) terjadinya kerusakan arsip ketika terjadi bencana banjir, maka kita akan terjebak pada penyelesaian yang sifatnya sementara (*symtomatic solution*)



KETERANGAN COVER

Kondisi Aceh pascatsunami, 24 Desember 2004
(Dok. HM. ANRI)

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Dra. Multi Siswati, MM

Pemimpin Redaksi:

Dra. Listianingtyas M.

Wakil Pemimpin Redaksi:

Eli Ruliawati, S.Sos

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,
Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si.,
Drs. Langgeng Sulistyono B,

Redaktur Pelaksana:

Gurandhyka, S. IP,
Neneng Ridayanti, S.S.,
Bambang Barlian, S.AP, Susanti, S.Sos., M.Hum.,
Eva Julianty, S.Kom.,
Adhie Gesit Pambudi, S.Sos., MA.

Sekretariat:

Sri Wahyuni, Ifta Wydyaningasih, A.Md,
Raistiwar Pratama, S.S

Reporter:

Ika Kartika, S.Ikom., Annawaty Betawinda M, S.Sos.,
Tiara Kharisma, S.Ikom., Erieka Nurlidya, S.Sos.,

Fotografer:

Hendri Erick Zulkarnaen, S.Kom, Supriyono,
Firmansyah, A.Md,

Editor:

Neneng Ridayanti, S.S.,
Eva Julianty, S.Kom,
Bambang Barlian, S.AP
Tiara Kharisma, S.I.Kom.

Perwajahan/Tata Letak:

Isanto, A.Md

Distributor:

Abdul Hamid, Farida Aryani, S.Sos
Achmad Sadari

.....
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: info@anri.go.id

Bencana, baik yang bersifat alami (*natural disaster*) maupun akibat kelalaian manusia (*man-made disaster*) tidak saja mengakibatkan kerusakan yang luar biasa, akan tetapi juga dapat menyisakan persoalan berkepanjangan di belakangnya. Lumpuhnya kegiatan organisasi yang disebabkan hilang atau rusaknya infrastruktur dan struktur serta suprastruktur menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan segera. Jika tidak dilakukan penanganan secara cepat maka akan berakibat fatal.

Tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pencegahan terhadap bencana atau jikapun tetap terjadi bencana yang disebabkan oleh hal tak terduga (*force major*), setidaknya dapat dilakukan penanggulangan untuk meminimalisasi dampak yang diakibatkannya.

Majalah Arsip edisi ke-60 ini memunculkan tema tentang bencana. Berbagai tulisan tentang bencana, baik yang terekam di dalam khazanah arsip maupun yang diperoleh dari sumber lainnya dan tulisan yang berisi tentang cara-cara penyelamatan arsip pascabencana, juga dimunculkan di dalam edisi ini.

Tentunya sebagaimana biasa, kami tuangkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, antara lain Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagai laporan utama.

Kami sadari bahwa begitu banyak bencana yang terjadi yang dapat dimunculkan. Jika pada majalah edisi kali ini masih dirasa kurang dalam menggambarkan keragaman bencana, hal ini disebabkan oleh terbatasnya tulisan yang masuk ke redaksi. Untuk itu kami sangat memerlukan masukan, kritik dan saran agar pada penerbitan edisi berikutnya akan lebih baik lagi.

Sebagai penutup, redaksi mengucapkan selamat menikmati isi majalah ini. Semoga dapat dipetik manfaatnya.

Redaksi

SELAMATKAN ARSIP MILIK NEGARA DARI BENCANA!



Arsip pertanahan yang basah akibat terkena bencana banjir (20080105/Dok. HM. ANRI)

Tak dapat dipungkiri, ekspedisi 'Cincin Api' yang diselenggarakan *KOMPAS* pada beberapa tahun lalu setidaknya telah menggugah kesadaran bahwa bangsa Indonesia hidup berdekatan dengan wilayah yang berbahaya. Dalam ekspedisi ini, diungkap dengan lugas mengenai gugusan vulkanik dan lempeng benua yang membentang di wilayah Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia.

Dengan kata lain, ancaman bencana alam dari suatu peristiwa alam sewaktu-waktu dapat terjadi di sekitar kita. Situasi bencana (*catastrophic situation*) bisa saja datang dengan tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya.

Ini merupakan risiko akibat wilayah Indonesia yang akrab dengan bencana. Perlu kewaspadaan yang tinggi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar 'cincin api' tersebut. Belum lagi kondisi sosio-masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, memungkinkan terjadinya gesekan kepentingan antargolongan masyarakat, sehingga memunculkan bencana non-alam dan bencana sosial lainnya seperti kebakaran akibat kelalaian manusia, kerusuhan ataupun konflik sosial lain yang mengancam disintegrasi bangsa.

Begitu dekatnya masyarakat Indonesia dengan ancaman bencana, menyebabkan pemerintah Indonesia

perlu mengantisipasi dampak bencana yang ditimbulkan. Awal Februari 2012, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada Forum Konsultasi Penanganan Bencana yang diikuti lebih dari 30 orang ahli bencana internasional, secara tegas mengatakan penanganan risiko bencana harus menjadi program nasional. Oleh karenanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus seiring dan sejalan dalam melakukan penanganan bencana.

Baik bencana alam dan bencana sosial tersebut, bukan hanya menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat tetapi juga

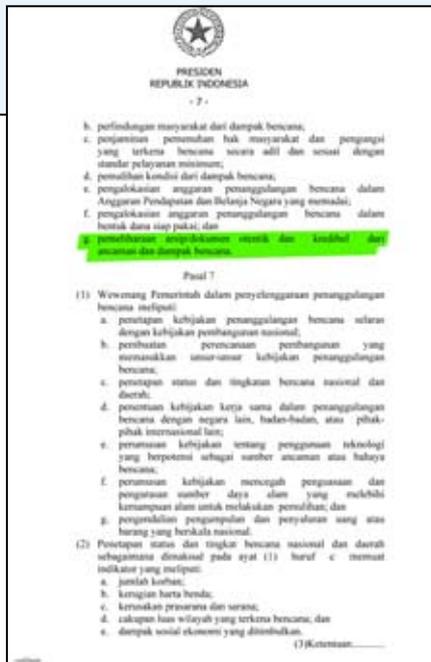
LAPORAN UTAMA

berimbang kepada hancurnya aset-aset kekayaan yang dimiliki negara dan masyarakat. Salah satu aset kekayaan yang dimaksud adalah arsip yang menjadi milik negara atau masyarakat secara individu. Keberadaan arsip sebagai aset kekayaan merupakan bukti akuntabilitas penyelenggaraan negara sekaligus sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Betapa pentingnya arsip dikemukakan pula oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra), Drs. Sugihartatmo, MPIA bahwa arsip bukan hanya untuk kepentingan akuntabilitas penyelenggaraan negara, tetapi juga memberi kontribusi dalam pemberian informasi tentang peradaban dan perkembangan bangsa untuk generasi mendatang.

Beberapa peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia, memperlihatkan



arsip sebagai salah satu aset kekayaan negara sangat rentan terkena imbas bencana. Belum banyak kesadaran dari penyelenggara negara untuk menyelamatkan arsip milik negara dari ancaman bencana. Ini bisa dibuktikan dari minimnya lembaga negara yang menyiapkan mitigasi bencana terhadap arsip. Hal ini diakui oleh M. Asichin, SH, M.Hum, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) periode 2010-Maret 2013 menjelaskan bahwa upaya penyelamatan arsip dari bencana akan berhasil apabila pencipta arsip pada lembaga juga turut terlibat sejak awal, utamanya pada saat sebelum terjadinya bencana bukan hanya pada saat tanggap darurat ataupun pascabencana. Itu artinya, setiap lembaga negara perlu mempunyai prosedur penanganan bencana terhadap arsipnya.



Dalam suatu kesempatan terpisah, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan (Pusjibang) Sistem Kearsipan ANRI, Rudi Anton, SH, MH memaparkan bahwa ANRI melalui Pusjibang Sistem Kearsipan, saat ini sedang menyusun pedoman mengenai upaya perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana. Pedoman ini nantinya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala ANRI dan dapat digunakan oleh lembaga kearsipan maupun seluruh pencipta arsip, khususnya bagi pencipta arsip yang menyimpan dan mengelola arsip milik negara. Lebih jauh dijelaskan, bahwa pedoman ini diharapkan menjadi panduan teknis bagi lembaga kearsipan dan pencipta arsip dalam menangani bencana, baik itu ketika prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.

Selama ini ANRI sudah mengeluarkan pedoman perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan arsip vital negara dalam bentuk Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005, pedoman ini hanya mengonsentrasikan kepada arsip vital milik negara. Padahal setiap lembaga negara banyak menyimpan arsip milik negara yang perlu diselamatkan, tidak hanya arsip vital. Lainnya, seperti arsip terjaga, arsip aset pemerintah, arsip statis, dan lainnya yang sejenis. Dalam Pasal 34 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mengamanatkan kepada negara untuk menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip milik negara dari bencana. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada Pasal 6 huruf g bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya meliputi pemeliharaan arsip/ dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Amanat Undang-Undang tersebut, menurut M. Asichin jelas meminta ANRI selaku penanggung jawab penyelenggaraan kearsipan untuk melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana. Hal itu sudah dilakukan jauh sebelum adanya Undang-Undang,” imbuhnya secara berapi-api. Peristiwa bencana alam yang terjadi di Aceh, Yogyakarta, dan Jakarta, telah melibatkan ANRI terutama pada saat tanggap darurat. Khusus di Aceh, ANRI terlibat bukan hanya melakukan restorasi arsip, tetapi sampai upaya pemulihan arsip. Peristiwa bencana tsunami yang menimpa Aceh dan Sumatera Utara pada akhir tahun 2004, telah menggugah ANRI yang ketika itu dipimpin oleh Djoko Utomo untuk menyelamatkan arsip yang terkait dengan hak keperdataan masyarakat yang dikelola Badan Pertahanan Nasional (BPN). ANRI bersama-sama BPN dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) melakukan aksi penyelamatan arsip dengan mengevakuasi dan pemulihan arsip dari Aceh ke Jakarta, dan itu telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk *International Council on Archives* (ICA) yang menyelenggarakan *International Gathering* mengenai penanganan bencana tsunami pada tahun 2005 lalu.

Namun ANRI menyadari bahwa upaya perlindungan dan penyelamatan arsip masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi tentang pentingnya arsip. Arsip masih belum sepenuhnya dipandang sebagai aset ataupun bahan bukti penyelenggaraan negara, sehingga pengelolaan arsip di beberapa lembaga negara belum serius, terlebih dalam menghadapi bencana, demikian penjelasan M. Asichin, yang terhitung



Kepala ANRI, M. Asichin

“ ANRI selaku penanggungjawab penyelenggaraan kearsipan untuk melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana ”

sejak 1 April 2013 memasuki masa purna bhakti.

Kepala ANRI periode 2010-Maret 2013 ini berharap, siapapun pemimpin ANRI berikutnya harus mampu meneruskan dan merealisasikan kerja sama dengan pihak lain, khususnya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), baik di tingkat pusat maupun daerah dalam melakukan penyelamatan arsip dari bencana. ANRI harus terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, karena itu merupakan salah satu

cara untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya arsip.

Menanggapi keinginan untuk bergerak bersama-sama dalam penanggulangan bencana, Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE selaku Sekretaris Utama BNPB menyambut positif. Menurutnya, prinsip tersebut sama dengan paradigma yang sedang dikembangkan BNPB, yaitu 'mengurangi risiko bencana'. ANRI bagi BNPB merupakan mitra dalam

LAPORAN UTAMA

melakukan penyelamatan arsip, bahkan dalam Undang-Undang Kearsipan tersurat bahwa upaya perlindungan dan penyelamatan arsip dilaksanakan oleh ANRI dan pencipta arsip serta dikoordinasikan bersama BNPB. Baginya, BNPB senantiasa terbuka untuk kerja sama dalam penanggulangan bencana, bahkan saat ini sudah 37 kementerian dan lembaga negara, belum termasuk ANRI. Materi kerja sama difokuskan kepada pengurangan risiko bencana mulai sejak prabencana, tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

Dalam penjelasannya, keberadaan BNPB lebih berfungsi sebagai koordinasi dan pelaksana penanganan bencana. Koordinasi dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana, termasuk penyiapan kebutuhan anggaran. BNPB menyadari bahwa dengan wilayah Indonesia yang rentan dan rawan bencana membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Adanya kerja sama dan koordinasi, setidaknya kekurangan anggaran dapat diatasi secara bersama-sama. Kemudian pelaksanaan dilakukan pada saat tanggap darurat. BNPB bertanggung jawab terhadap pembentukan posko (pos komando), keberadaan posko tidak hanya sebagai lokasi sementara evakuasi, tetapi sekaligus berfungsi sebagai pusat komunikasi publik mengenai informasi bencana. Menurutnya, apabila upaya koordinasi dan pelaksanaan berfungsi dan berjalan dengan baik maka upaya pencapaian visi BNPB, yaitu ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana, dapat segera terlihat. Dalam kesempatan akhir wawancaranya, Ir Fatchul Hadi, Dipl, HE ini berharap *Memorandum of Understanding (MoU)* penanggulangan bencana antara ANRI dan BNPB dapat

“ bencana kearsipan kalau tidak segera teratasi akan berdampak kepada kerugian yang lebih luas karena menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara. BNPB pun siap turut membantu mensosialisasikan pentingnya penyelamatan arsip dari bencana ”



Sekretaris Utama BNPB, Fatchul Hadi

segera terwujud. Menurutnya bencana kearsipan kalau tidak segera teratasi akan berdampak kepada kerugian yang lebih luas karena menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. BNPB pun siap turut membantu mensosialisasikan pentingnya penyelamatan arsip dari bencana.

Terkait dengan bencana, Sesmenko Kesra dalam kesempatan lain berpendapat bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab melakukan koordinasi terhadap hal-hal apa yang

akan dilakukan kementerian atau lembaga negara termasuk ANRI dan BNPB terkait dengan status tanggap darurat, pascatanggap darurat, dan rehabilitasi suatu bencana sehingga semua kegiatan penanggulangan bencana dapat berlangsung dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan bencana ini sejalan dengan amanat Presiden SBY dalam pidatonya saat membuka Konferensi Internasional Soal Bencana pada akhir tahun 2012. Dalam kesempatan tersebut, SBY berulang kali menyebut kesiapsiagaan bangsa Indonesia, khususnya bencana yang terjadi di Aceh dan Yogyakarta yang telah menjadi model penanggulangan bencana.

Presiden bahkan mencatat ada enam pembelajaran yang dapat dipetik ketika bangsa Indonesia melakukan penanggulangan bencana, yaitu (1) respon yang cepat pada tahapan tanggap darurat; (2) komunikasi publik yang cepat sehingga penyaluran bantuan bencana tepat sasaran; (3) pentingnya koordinasi pada setiap tahapan penanggulangan bencana;



Tim *Task Force* ANRI saat mengevakuasi arsip akibat bencana banjir di Jakarta (20130125/Dok. HM. ANRI)

(4) pola kepemimpinan untuk memimpin proses penanggulangan bencana; (5) lakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus; dan (6) kesiapsiagaan yang bertumpu pada SDM, partisipasi masyarakat, dan dukungan alat penunjang. Implementasi dari pembelajaran di atas bertumpu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam regulasi tersebut mengamanatkan BNPB selaku pengarah sekaligus pelaksana penanggulangan bencana.

Sementara, ANRI sebagai kepanjangan tangan negara bertanggungjawab dalam perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana nasional. Ketika ANRI melalui *Task Force Team* dan mobil *Rescue*-nya bergerak melakukan penyelamatan arsip, maka semua orang akan melihat dan menyadari begitu pentingnya arsip milik negara bagi negara dan masyarakat. Hal tersebut didukung



Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Drs. Sugihartatmo, MPIA

oleh Sesmenko Kesra, Sugihartatmo yang berpendapat bahwa *Task Force Team* ANRI harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa ANRI mengambil peranan dalam membantu penyelamatan dan perlindungan arsip yang terkena

bencana, termasuk juga menjelaskan manfaat adanya penyelamatan arsip ini.

ANRI harus mampu menunjukkan bahwa tindakan menyelamatkan arsip milik negara dari bencana merupakan tindakan menyelamatkan 'marwah bangsa'. Upayanya semata-mata ingin menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban nasional, karena melalui arsip semua rekam jejak bangsa Indonesia umumnya, maupun penyelenggaraan negara khususnya dapat terselamatkan. Keberadaannya merupakan 'saksi bisu' yang tidak terbantahkan, sangat kredibel dan akuntabel. Oleh karenanya, tidaklah salah apabila momentum hari kearsipan pada tahun 2013 ini, ANRI terus mengingatkan kepada kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan badan publik lain yang memiliki arsip negara untuk bertindak menyelamatkan arsip milik negara dari bencana. (BPW)



Tuti Sri Widayanti :

PENDOKUMENTASIAN ARSIP BENCANA UPAYA MENGETAHUI POLA PENANGGULANGAN BENCANA

*Kawan coba dengar apa jawabnya
Ketika dia kutanya mengapa
Bapak ibunya tlah lama mati
Ditelan bencana tanah ini
Sesampainya di laut kukabarkan semuanya
Kepada karang kepada ombak kepada matahari
Tetapi semua diam, tetapi semua bisu
Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit*

*Barangkali di sana ada jawabnya
Mengapa di tanahku terjadi bencana
Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang*

Lirik lagu di atas mengawali pembahasan tentang bencana yang terjadi di sekitar kita. Lirik tersebut identik dengan sesuatu yang buruk, menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Menginjak awal tahun 2013, Jakarta dihadapkan dengan musibah bencana banjir yang menurut media masa merupakan banjir terparah. Di beberapa wilayah yang merupakan jantung ibu kota, seperti bundaran Hotel Indonesia juga mengalami banjir, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat

besar mencapai kurang lebih 20 triliun rupiah. Banjir memiliki efek yang sangat besar, tidak hanya merusak bangunan tetapi juga melumpuhkan aktivitas di ibu kota. Bencana banjir tidak hanya terjadi di Jakarta, di beberapa wilayah Indonesia lainnya pun tidak luput dari bencana lainnya. Terbukti bahwa beberapa tahun terakhir ini Indonesia mengalami beberapa bencana, antara lain tsunami, gempa bumi, dan lain-lain.

Indonesia harus selalu siap dengan hadirnya bencana, karena memang Indonesia terletak di wilayah yang

rawan bencana. Beberapa alasan Indonesia merupakan wilayah rawan bencana adalah karena faktor alam dan faktor non-alam.

Pertama, faktor alam, wilayah Indonesia terletak di antara tiga lempeng bumi yang aktif, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Lempeng aktif artinya lempeng tersebut selalu bergerak dan saling berinteraksi. Lempeng Pasifik bergerak relatif ke Barat, lempeng Indo-Australia relatif ke utara dan lempeng Eurasia bergerak relatif ke tenggara. Sewaktu-waktu lempeng



Peta lempeng Eurasia

ini akan bergeser patah menimbulkan gempa bumi. Selanjutnya jika terjadi tumbukan antarlempeng dapat menghasilkan tsunami, seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara.

Indonesia juga merupakan jalur *The Pacific Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik). Cincin Api Pasifik membentang di antara subduksi maupun pemisahan lempeng Pasifik dengan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara dan lempeng Nazca yang bertabrakan dengan lempeng Amerika Selatan. Ia membentang dari mulai pantai barat Amerika Selatan, berlanjut ke pantai barat Amerika Utara, melingkar ke Kanada, semenanjung Kamsatschka, Jepang, Indonesia, Selandia baru dan kepulauan di Pasifik Selatan. Indonesia memiliki gunung berapi dengan jumlah kurang lebih 240 buah, di mana hampir 70 di antaranya masih aktif. Zona kegempaan dan gunung api aktif Circum Pasifik amat terkenal, karena setiap gempa hebat atau tsunami dahsyat di kawasan itu, dipastikan menelan korban jiwa manusia amat banyak.

Iklim tropis yang dimiliki Indonesia, dengan curah hujan yang cukup tinggi akan memudahkan terjadinya pelapukan, sehingga mengakibatkan

bencana longsor dan bencana banjir bandang.

Kedua, faktor non-alam, kepadatan penduduk di Pulau Jawa dibanding wilayah lain mengakibatkan bangunan rumah, bangunan-bangunan besar, dan gedung belum banyak disesuaikan dengan kondisi alam ini, sehingga memunculkan bencana sosial lainnya.

Penanggulangan Bencana

Kita selayaknya dapat mengantisipasi sebelum bencana itu datang, mengetahui bagaimana cara menyelamatkan jika bencana terjadi, dan bagaimana pemulihan pada saat selesainya bencana. Rawannya Indonesia terhadap bencana, sangat menjadi perhatian dalam tanggung jawab penanggulangannya. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana, yakni, Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan

dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana. Keenam, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, di Pasal 34 mengamanatkan bahwa negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pencipta arsip dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik tingkat pusat dan daerah.

Beberapa daerah yang sering terjadi bencana telah menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut dengan membuat peraturan tentang penanggulangan bencana di daerahnya, seperti, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana yang diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun non



Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di BNPB. Di ruangan ini informasi terkait dengan bencana dikumpulkan, diproses, dianalisa, dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya. Informasi kebencanaan di sini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan berbagai pihak baik saat prabencana maupun pascabencana. Di tempat ini pula terekam kegiatan atau peristiwa bencana yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Dok. HM. ANRI)

pemerintah seperti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Usaha, dan Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.

Dokumentasi Arsip Bencana dan Pola Penanggulangan Bencana

Lembaga-lembaga penanggulangan bencana sebagai lembaga negara berkewajiban untuk menghasilkan arsip yang merekam kegiatan atau peristiwa penanggulangan bencana dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip yang dihasilkan perlu dikelola, baik arsip dinamis maupun arsip statisnya.

Penggunaan arsip dinamis,

rekaman kegiatan atau peristiwa penanggulangan bencana dilakukan untuk memenuhi kepentingan kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, atau penyelesaian sengketa. Sedangkan arsip statisnya dikelola untuk digunakan sebagai pertanggung jawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip yang dihasilkan dari rekaman kegiatan atau peristiwa penanggulangan bencana oleh lembaga-lembaga penanggulangan bencana, pada dasarnya mengandung data dan informasi akurat yang dapat digunakan sebagai penyusunan pola penanggulangan tiap jenis bencana. Dokumentasi bencana yang meliputi pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi tentang

tahapan penanggulangan bencana, terutama pada saat tanggap darurat dan pascabencana akan menghasilkan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan pola penanggulangan bencana di Indonesia. Pada akhirnya digunakan pula sebagai pembelajaran untuk mengatasi bencana berikutnya, sehingga dapat melakukan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana secara lebih baik.

Azmi :

PENANGGULANGAN KERUSAKAN ARSIP AKIBAT BENCANA BANJIR



Proses penanganan awal pada arsip yang terendam banjir

Bencana yang kerap kali terjadi di negara kita dalam beberapa dekade terakhir telah membangunkan masyarakat dari tidur panjang. Bahwa bencana dapat terjadi setiap saat, di mana saja, dan dampaknya dapat menimpa siapapun. Selain menimbulkan banyak korban jiwa, bencana juga menimbulkan penderitaan, kerusakan, dan kerugian. Untuk memulihkan dampak bencana memerlukan sumber daya cukup besar dan waktu cukup lama.

Bencana adalah peristiwa atau

rangkain peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Terjadinya bencana disebabkan oleh banyak faktor, namun secara garis besar faktor penyebab bencana dapat dikelompokkan ke dalam dua

kelompok, yaitu faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam meliputi gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin topan, banjir, letusan gunung api, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit. Faktor non-alam meliputi kebakaran, kegagalan teknologi, kerusahan sosial, terorisme dan kerusakan lingkungan dalam skala besar karena ulah manusia.

Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan salah satu jenis bencana yang disebabkan

ARTIKEL LAPORAN UTAMA

oleh faktor alam. Bencana banjir adalah kondisi air yang menenggelamkan atau menggenangi suatu area atau tempat yang luas yang mengakibatkan kerugian baik jiwa maupun harta benda. Jika dilihat dari tipologinya, jenis bencana banjir terdiri atas banjir bandang, banjir hujan ekstrim, banjir luapan sungai/banjir kiriman, banjir pantai (*rob*), dan banjir hulu.

Apapun jenis tipologinya, bencana banjir menimbulkan kerugian material maupun non-material. Kejadian bencana banjir hampir setiap tahun dialami oleh hampir sebagian masyarakat Indonesia, khususnya saat musim hujan. Bencana banjir di beberapa kawasan Indonesia pada dasarnya merupakan kejadian alam yang sering pula terjadi di negara-negara lain. Namun, kejadian banjir dirasakan menjadi sesuatu yang “luar biasa”, setelah kemampuan kita sebagai manusia untuk mengendalikan daya rusak air banjir sebagaimana mestinya ternyata tidak lagi memadai.

Dalam kondisi demikian, kita tidak mungkin lagi menghindari timbulnya kerugian akibat dari bencana banjir, salah satu jenis kerugian itu adalah terjadinya kerusakan arsip/dokumen penting pada kantor pemerintah, perguruan tinggi, organisasi politik (*orpol*), organisasi masyarakat (*ormas*), dunia usaha, dan perumahan penduduk yang terkena bencana banjir. Kondisi arsip yang rusak akibat banjir umumnya sulit untuk dapat dipulihkan kembali seperti kondisi semula. Hal yang mungkin masih bisa dilakukan hanyalah berusaha mengurangi dampak kerusakan yang lebih parah terhadap arsip yang terendam air banjir.

Dampak Bencana Banjir

Dampak bencana banjir yang melanda kantor pemerintah,



Proses pendataan arsip yang terkena bencana banjir

perguruan tinggi, *orpol*, *ormas*, dunia usaha, dan pemukiman masyarakat adalah kerusakan gedung, prasarana dan sarana kantor, kendaraan, rumah, lingkungan, dan arsip (*file* kerja kantor, dokumen keluarga: akte, kartu keluarga, ijazah, BPKB, dll). Hal ini berakibat terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, dan aktivitas kehidupan sosial masyarakat serta menurunnya kualitas lingkungan.

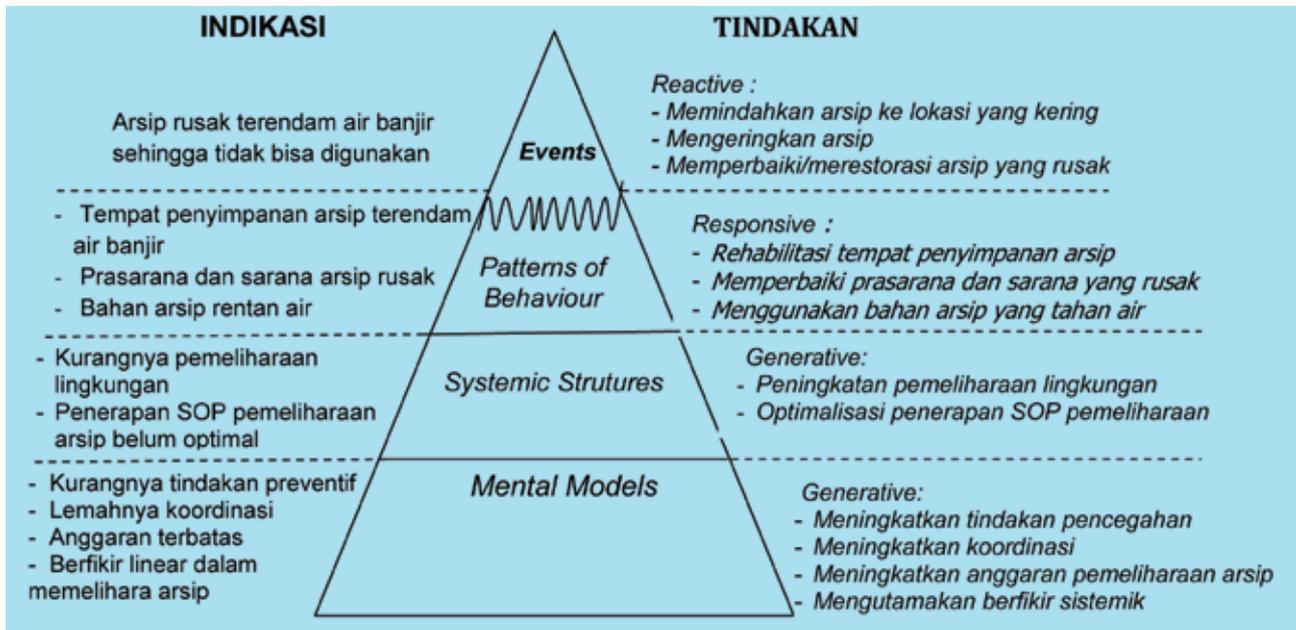
Bagi instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dampak yang ditimbulkan dari kerusakan arsip yang disebabkan oleh bencana banjir yakni, pertama, pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Kedua, pelayanan tidak dapat diberikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Ketiga, konsistensi, kontinuitas, dan produktivitas dalam manajemen

serta administrasi terganggu. Keempat, ketidakmampuan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

Kelima, kurangnya perlindungan dan dukungan terhadap litigasi termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau kekurangan bahan bukti kegiatan organisasi. Keenam, kurangnya perlindungan terhadap kepentingan organisasi dan hak pegawai, klien, dan pemangku kepentingan saat ini dan masa depan.

Ketujuh, lemahnya dukungan dan pendokumentasian kegiatan penelitian dan pengembangan saat ini dan masa depan, sekaligus pencapaiannya, juga yang berkaitan dengan penelitian sejarah. Kedelapan, lemahnya jaminan terhadap pemeliharaan memori korporat, personal, identitas kolektif, dan budaya.



Teori Gunung Es "The Iceberg and Level of Perspective"

Analisis Penyebab Kerusakan Arsip ketika Banjir

Untuk memahami permasalahan kerusakan arsip ketika terjadi bencana banjir, kita perlu memahami secara mendalam apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan arsip apabila terjadi musibah banjir. Memang benar fakta yang nampak dipermukaan adalah arsip rusak karena adanya bencana banjir. Namun, apabila kita tidak berupaya menggali lebih jauh penyebab utama (*fundamental problem*) terjadinya kerusakan arsip ketika terjadi bencana banjir, maka kita akan terjebak pada penyelesaian yang sifatnya sementara (*symtomatic solution*), sehingga energi kita habis untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak pernah selesai dan terus berulang.

Sebagi upaya memahami dinamika lingkungan, kita harus mengamati apa yang terdapat di intra dan ekstra *sociatal environment*. Dinamika lingkungan dapat diartikan sebagai perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan



Contoh arsip yang rusak parah akibat terendam bencana banjir

budaya, oleh karena itu perubahan lingkungan dapat diamati melalui Teori Gunung Es/*Ice Berg Theory* (Kees van Hijden, 1993), meliputi peristiwa (*event*), kecenderungan (*trend*) dan pola (*patterns*), struktur (*structure*).

Adakalanya suatu permasalahan dapat dilihat secara nyata melalui

ketiga pengamatan di atas, tetapi adakalanya tidak. Oleh karena itu Kees van Hijden menggambarkan ketiga pengamatan itu dalam bentuk gunung es yang berada di bawah dasar laut (*Ice Berg Theory*) untuk mengetahui permasalahan inti (*fundamental problem*) terhadap suatu peristiwa yang terjadi.



Tim Restorasi Arsip ANRI sedang menangani arsip yang rusak akibat terkena bencana banjir

Analisis permasalahan penyebab kerusakan arsip ketika bencana banjir melanda kantor pemerintah, perguruan tinggi, orpol, ormas, dunia usaha, dan perumahan penduduk dapat digunakan *Ice Berg Theory*.

Apabila dilihat dari gambar gunung es di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab utama kerusakan arsip ketika terjadi bencana banjir sebenarnya penyebab utamanya bukanlah banjir. Kerusakan arsip ketika banjir hanyalah salah satu variabel penyebab. Oleh karena kerusakan arsip yang disebabkan oleh banjir adalah hanyalah suatu peristiwa (*event*) sebagai akibat dari terjadinya kerusakan pada lapisan *pattern of behavior* (tempat penyimpanan arsip, prasarana dan sarana, bahan arsip

rentan air). Kerusakan yang terjadi pada lapisan *pattern of behavior* disebabkan oleh lapisan *systemic structure* (kurangnya pemeliharaan lingkungan, belum optimalnya penerapan *Standar Operating System* (SOP) pemeliharaan arsip). Kerusakan yang terjadi pada lapisan *systemic structure* sebagai akibat dari lapisan *mental models* (kurangnya tindakan preventif, lemahnya koordinasi, anggaran yang terbatas, dan cara berpikir yang linear dalam memelihara arsip terhadap pemeliharaan arsip).

Berdasarkan analisis *Ice Berg Theory* tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah utama (*fundamental problem*) penyebab kerusakan arsip ketika terjadi bencana banjir bukanlah banjir,

tetapi kurangnya tindakan preventif, lemahnya koordinasi, anggaran yang terbatas, dan cara berpikir yang linear dalam memelihara arsip terhadap pemeliharaan arsip.

Setelah *fundamental problem* telah diketahui, maka tindakan yang harus dilakukan oleh otoritas penyelenggara kearsipan yakni, pertama, mengutamakan tindakan preventif dalam memelihara arsip. Kedua, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam memelihara arsip. Ketiga, meningkatkan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan arsip. Keempat, berpikir sistemik dalam melakukan pemeliharaan arsip.

Penanganan Arsip ketika Banjir

Upaya penanggulangan kerusakan arsip akibat bencana banjir tidak saja

dilakukan melalui analisis pengenalan masalah secara teoritis, tetapi juga harus dilakukan melalui tindakan nyata agar risiko kerusakan arsip dapat dihindari. Tindakan yang harus dilakukan adalah penanganan arsip ketika terjadi bencana banjir. Hal ini dapat dilakukan dengan tahapan kerja meliputi koordinasi, penanggulangan, dan rehabilitasi-rekonstruksi.

Koordinasi

Tahap pertama melaksanakan koordinasi antarinstansi terkait (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lembaga kearsipan). Kedua, upaya mitigasi kerusakan arsip. Ketiga, antisipasi dan upaya pencegahan kerusakan arsip.

Keempat, inventarisasi kerusakan dan penanganan kerusakan arsip. Kelima, dukungan penanganan kerusakan arsip. Keenam, penyelamatan dan evakuasi arsip. Ketujuh, pelayanan perbaikan arsip. Kedelapan, normalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi kerusakan arsip.

Penanggulangan

Pada tahap penanggulangan, pertama kali yang harus dilakukan adalah antisipasi mitigasi kerusakan arsip, meliputi *Early Warning System*, antisipasi, dan upaya pencegahan kerusakan arsip serta tanggap darurat. Pada tahapan tanggap darurat, pertama kali yang harus dilaksanakan, pertama, mobilisasi bantuan tanggap darurat terhadap pencipta arsip. Kedua, bantuan pertolongan dan penanganan arsip.

Ketiga, bantuan penanganan sarana kearsipan. Keempat, penanganan darurat infrastruktur kearsipan. Kelima, pemulihan fungsi penyelenggaraan kearsipan. Keenam, bantuan pelayanan konsultasi kearsipan.



Proses Freezing. Arsip yang terendam banjir dikeringkan dengan menggunakan mesin Dry Chamber.

Rehabilitasi-Rekonstruksi

Pada tahap rehabilitasi-rekonstruksi, yang harus dilaksanakan meliputi, pemulihan fungsi prasarana kearsipan, rehabilitasi infrastruktur kearsipan, rekonstruksi prasarana kearsipan, peningkatan kapasitas sistem kearsipan, perbaikan lingkungan kerja, penataan ruang pengelolaan arsip, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip, dan peningkatan koordinasi kerja dengan instansi terkait.

Renungan

Kita yakin ada hubungan antara peristiwa-peristiwa alam dengan perilaku manusia. Manusia adalah bagian dari tatanan kosmik. Oleh karena itu, untuk mencapai hubungan yang harmonis dengan alam, kita harus menghormati alam, mencintainya, dan menyesuaikan diri dengannya. Kita harus bersahabat dengan alam.

Rangkaian bencana yang menimpa negeri ini, yang berdampak terhadap korban jiwa, harta benda, dan kerusakan arsip/dokumen penting

negara, dunia usaha, dan masyarakat, seharusnya menyadarkan kita bahwa selama ini kita tidak lagi bersahabat dengan alam, tidak berpikir sistemik, dan tidak bertindak preventif/antisipatif dalam memelihara arsip. Apa yang kita lakukan kepada alam, cara berpikir, dan pola bertindak kita dalam memelihara arsip, semuanya akan kembali kepada kita.

Kita dituntut bukan hanya ikut menangis bersama mereka (para korban banjir), tetapi harus mengembalikan lagi hak mereka untuk menikmati kehidupan yang sudah kita rampas karena telah merusak alam, cara berpikir yang linear, dan selalu bertindak reaktif dalam mengatasi permasalahan.

Tuhan tidak akan menerima ibadah siapa pun di antara kita kalau kita berbuat *dzalim*. Merusak alam, berpikir linear, selalu bertindak reaktif, dan berpangku tangan dalam melihat musibah banjir adalah salah satu bentuk *kedzaliman* yang dapat menurunkan kita dari derajat kemanusiaan.

Ina Mirawati :

BENCANA PERANG DARI ARSIP FILM HINGGA ARSIP FOTO



Suasana PD II di Eropa
ANRI, Arsip Foto NIGIS
Jakarta No.333

Siapapun pasti tidak menginginkan terjadinya bencana, baik itu bencana karena alam maupun ulah manusia. Tsunami, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, wabah epidemi, termasuk bencana yang disebabkan oleh alam. Namun tidak semua bencana alam disebabkan alam saja, tetapi ada campur tangan manusia yang tidak bersahabat dengan alam dan tidak menjaga ekosistem alam. Mereka menebang pohon-pohon di hutan, membangun villa, mendirikan rumah-rumah di lereng pegunungan sehingga tanah

tidak dapat menampung air ketika hujan turun karena tidak ada daerah resapan. Ulah manusia juga dapat menyebabkan bencana, salah satunya adalah bencana perang.

Sayidiman Suryohadiprojo menyatakan bahwa perang adalah suatu tindakan kekerasan di mana satu pihak memaksa pihak lain untuk tunduk kepada kehendaknya. (Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, hlm 2: 2008). Bencana perang juga merupakan pencitraan unjuk ambisi, keegoisan dan pamer kekuasaan sang penguasa dalam

upaya menaklukkan negara lain ataupun adanya motivasi politik golongan tertentu, dan telah ada sejak manusia diciptakan hingga sekarang.

Perang Dunia I dan II merupakan bencana perang terbesar dan berimbas pada seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak bencana perang mengakibatkan penduduk kehilangan harta, benda bahkan nyawa. Di sisi lain, bencana perang juga dapat menjadikan arsip, dokumen, manuskrip/naskah terancam musnah karena adanya perang di utara kota Mali baru-baru ini. ("Manuskrip Timbuktu Terancam



Pemboman oleh tentara Sekutu di P. Biak
ANRI, Arsip Foto NIGIS Wilayah Irian No. L 24-20-5



Pasukan Sekutu mendarat di Morotai (PD II)
ANRI, Arsip Foto NIGIS Wilayah Maluku No. L26-23-13

Musnah Disapu Perang”, *Republika*, 11 Feb 2013). Ini menandakan bahwa semua arsip, dokumen, manuskrip/naskah mempunyai arti yang sangat penting dan harus diselamatkan ketika terjadi bencana.

Pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia, untuk mempertahankan kerajaan dan daerah kekuasaannya, para raja yang dibantu rakyatnya mengangkat senjata berperang untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Setiap komandan Hindia

Belanda yang memimpin perang membuat laporan secara lengkap kejadian tersebut dan laporan tersebut terekam dalam arsip kertas, seperti *dag register* (catatan harian), politik *verslag* (laporan politik), korespondensi (surat menyurat). Arsip Kontrak Perjanjian yang ditandatangani oleh para raja pribumi dengan pemerintah Hindia Belanda adalah salah satu bukti autentik atas kemenangan yang diraih pemerintahan Hindia Belanda karena berhasil menaklukkan perang para



Tentara Australia sedang mencari korban akibat pengeboman Sekutu di Kupang. ANRI, Arsip Foto NIGIS wilayah NTT No. A 15488

raja pribumi tersebut. (ANRI, Arsip Kontrak Perjanjian antara Raja-raja Pribumi dengan Pemerintahan Hindia Belanda).

Bencana Perang dalam Arsip Film dan Foto

Ketika berlangsung bencana perang di sebuah negara, maka tugas para wartawan perangnya untuk meliput kejadian tersebut. Mereka juga harus mempertaruhkan nyawanya pada saat pengambilan film di tengah-tengah peperangan agar film yang mereka liput dapat didokumentasikan. Melalui film yang mereka dapatkan, maka masyarakat dapat mengetahui kejadian perang tersebut. Namun ada pula film yang didokumentasikan untuk kepentingan sejarah atau untuk mengenang seorang tokoh dengan mengganti peran tokoh yang sudah meninggal tersebut.

Sebuah cerita yang dikemas dengan baik dan disajikan dalam sebuah film akan menghasilkan sebuah karya yang indah untuk ditonton. Pada saat ini beredar sebuah film yang sudah banyak ditonton oleh masyarakat, menceritakan perjalanan hidup mantan Presiden RI, B.J. Habibie dan Ibu Ainun (alm). Kisahnya sangat menarik karena ternyata oleh sutradara disisipkan juga film dokumenter ketika Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden.



Pelaksanaan Trikora di Irian Barat, 1962
ANRI, Arsip Foto Kempen Irian Barat No.63-6639

Arsip film adalah arsip yang menyimpan informasi berupa *moving image* atau citra bergerak, terekam dalam rangkaian gambar fotografik dan suara pada bahan dasar film yang penciptaannya menggunakan teknis dan artistik dengan menggunakan peralatan khusus (Keputusan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Film). Arsip film hitam putih disimpan pada suhu 10° C dengan kelembaban 40-55% RH, dan arsip film berwarna disimpan pada suhu yang lebih rendah dari 10° C sampai 0° C. Setiap arsip film mempunyai jenis yang berbeda, yaitu 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm, dimasukkan ke dalam sebuah *can* dan disusun pada rak yang bergerak (*roll o'pack*). Oleh karena cahaya dapat merusak *image* dan warna pada film,



Pemulangan tentara Jepang yang dulu ikut Perang Pasifik.
ANRI, Arsip Film Gelora Indonesia no. 240.



Kerusakan kota akibat pemboman oleh Sekutu di NTT.
ANRI, Arsip Foto NIGIS wilayah NTT No. A 15466

maka arsip film harus disimpan dalam tempat gelap.

Penyimpanan arsip film jangka menengah (10 tahun) harus disimpan dalam wadah tertutup untuk mencegah kontaminasi dari partikel debu dan kerusakan fisik yang dapat merusak film. Wadah sebaiknya terbuat dari

polystyrene, *polypropilene* dan *polietilen* dan bukan wadah dari logam atau karton. Untuk mencegah terjadinya efek *silvering out* maka arsip film yang tersimpan rapat dalam *can* harus dikeluarkan dan dikering-anginkan untuk mengurangi uap asam yang terdapat di dalam *can* tersebut.



Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya melawan Tentara Sekutu. **ANRI, Arsip Foto NIGIS Jakarta No. 513**

Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan arsip film berjumlah 55.869 *reel* yang terdiri dari Gelora Indonesia, Gelora Pembangunan, Siaran Khusus, Siaran Kilat, Perusahaan Film Negara (PFN), *Worden de Wereld* (WW). Informasi yang disajikan dalam Arsip Film antara lain mengenai masalah sosial, politik, keamanan, hubungan luar negeri, kesehatan, ilmu pengetahuan. Waktu putar setiap arsip film adalah 60 menit. Khusus untuk arsip film WW isinya seputar kehidupan sosial masyarakat dengan kata pengantar dalam bahasa Belanda.

Di antara informasi yang terdapat dalam arsip film adalah film mengenai bencana perang, yaitu bencana perang akibat pengeboman dalam Perang Dunia II di Eropa, pemulangan tentara Jepang yang dulu ikut Perang Pasifik, Pertempuran Surabaya 10 November 1945, Pelaksanaan Tri Komando Rakyat di Irian Jaya tahun 1962.

Jika dalam arsip film terdapat bencana perang yang telah didokumentasikan, maka penulis juga ingin memberikan gambaran bahwa bencana perang tersebut terekam juga dalam arsip foto, di mana peristiwa yang terjadi sama seperti yang ada di film. Sebagai contoh adalah arsip foto mengenai mendaratnya pasukan Sekutu di Morotai, hancurnya kota di Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari bencana perang.

Hal itu berarti bahwa ketika menjelajah bencana perang dalam arsip film dan foto banyak ditemukan kesinambungan di antara keduanya. Penggambaran bencana perang yang terekam dalam film dengan penyuguhan suara pembawa narasi film yang penuh semangat serta diiringi dengan suara tembakan, bom yang menggelegar membuat arsip film sangat menarik untuk ditonton. Sementara kejadian tersebut juga dapat diketemukan dalam arsip foto,

ketika bubungan asap dari bom yang diledakkan pada saat Perang Dunia II di Eropa terpotret dengan jelas. Oleh karena itu seorang pengguna arsip sangat dianjurkan juga untuk menyaksikan arsip film selain melihat arsip fotonya. Seiring pula dengan perkembangan jaman dan kecanggihan teknologi, maka arsip film dapat dialihmediakan ke dalam bentuk CD atau DVD.

Pada saat ini semakin banyak televisiwastayangmengalihmediakan arsip film dan arsip foto untuk disiarkan bagi kepentingan publik dalam bentuk film, foto dokumentasi, dengan demikian peristiwa sejarah pun tidak akan dilupakan, seperti pesan Presiden Soekarno, "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jas Merah)".

Dharwis Widya Utama Yacob :

BELAJAR MENGATASI BANJIR DARI HERMAN VAN BREEN



Banjir yang melanda di Indonesia di masa lalu, 1955

Sumber: ANRI, Kempen KR 550218 FG 3-6, Kempen KR 550218 FG 3-17

Saat musim penghujan tiba, banjir selalu menghantui Jakarta, ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan banjir menjadi musibah tahunan yang sepertinya tak mungkin teratasi. Banjir juga tidak menjadi bencana tahunan di Jakarta saja, di daerah lain pun banyak terkena banjir. Tentu saja hal tersebut hampir membuat masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya warga Jakarta bertanya-tanya bagaimanakah mengatasi banjir di Indonesia? Siapakah orang yang bisa mengatasi banjir yang melanda di Indonesia? Tentunya kita pun belajar kembali ke masa lalu dan mencari tahu cara mengatasinya.

Banjir pernah melanda di Indonesia pada 19 Februari 1918. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia-Belanda. Pada waktu itu, salah satu

daerah bagian dari Hindia Belanda yaitu Batavia mengalami bencana banjir. Hampir seluruh Batavia mengalami kebanjiran, di antaranya daerah Pinangsia, Tanah Tinggi, Pejambon, Grogol, Kebon Jeruk, Kampung Tambora, dan Glodok. Melihat kondisi seperti itu, *Gemeenteraad Batavia* (sekarang mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) langsung mengadakan sidang paripurna pada 19 Februari 1918, pukul 19.15. Dalam sidang paripurna ini turut hadir wali kota dan 14 anggota *gemeneraad*. Selain itu, hadir pula Herman van Breen yang merupakan ahli tata air Batavia. Pada sidang paripurna tersebut, anggota *Gemeneraad* mengutus Herman van Breen untuk mengatasi banjir di Batavia yang saat itu menunjukkan peran pentingnya dalam mengatasi masalah banjir di Batavia.

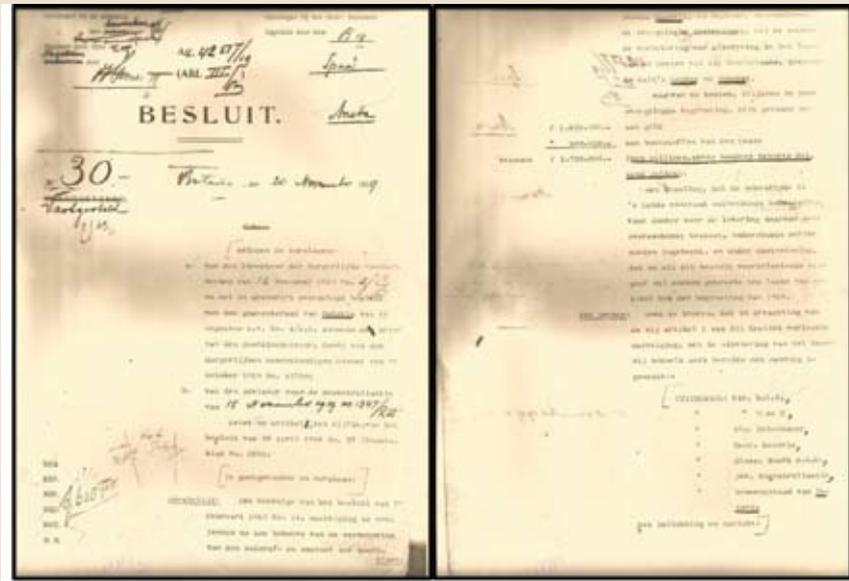
Herman van Breen adalah seorang insinyur hidrologi yang bekerja pada *Burgelijke Openbare Werken (BOW)* (sekarang mirip seperti Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia). Selain itu, beliau pun berperan sebagai pengajar untuk materi bangunan pengairan di *Technische Hoogeschool* (sekarang Institut Teknologi Bandung/ITB) periode Juli 1922 s.d. 20 Juni 1923.

Herman van Breen memiliki rencana untuk mengatasi banjir Batavia, antara lain dengan memecah aliran sungai yang masuk Batavia melalui sebelah kiri dan kanan Batavia sehingga aliran air tidak ada yang masuk tengah kota dengan membentuk "Tim Penyusun Rencana Pencegahan Banjir". Beliau ditugaskan menyusun konsep terpadu penanggulangan banjir di wilayah Batavia yang luasnya mencapai 2500 hektar.

Dalam menyusun rencana pencegahan banjir, van Breen mengidentifikasi beberapa masalah banjir di Batavia, yakni ketika hujan datang mengguyur Batavia selalu dibarengi dengan turunnya air dari sungai-sungai dari Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak yang dikenal kini dengan istilah "banjir kiriman". Kemudian morfologi (wujud permukaan) tanah di Batavia yang landai serta banyak ditemukan tanggul-tanggul alamiah sehingga jika terjadi hujan tidak cepat mengalir di muara, serta yang terakhir adalah terdapatnya laut dangkal yang terdapat di sepanjang Teluk Batavia yang

menyebabkan gelombang pasang dan menimbulkan wilayah-wilayah genangan di daerah yang berdekatan dengan Teluk Batavia. Dari situlah terciptalah konsep yang dikenal dengan nama Banjir Kanal Barat.

Banjir Kanal Barat atau disebut juga Banjir Kanal Manggarai-Karet dibangun dalam dua tahap. Tahap pembangunan pertama dimulai dari Pintu Air Manggarai menuju arah barat melewati Pasar Rumput, Dukuh Atas, lalu membelok ke arah barat laut di daerah Karet. Tahap kedua dibangun setelah BOW mendapat bantuan dana dari pemerintah. Tahap kedua dibangun dari Karet menuju ke arah Tanah Abang, Tomang, Grogol, Pademangan, dan berakhir di sebuah penampungan air di muara, daerah Pluit. Konsep Banjir Kanal Barat membatasi volume air yang masuk ke Batavia melalui 13 sungai, di antaranya Sungai Cakung, Jati Kramat, Buaran, Sunter, Cipinang, Ciliwung, Cideng, Krukut, Grogol, Sekretaris, Pesanggrahan, Mookervart, dan



Surat mengenai anggaran pembangunan saluran air dari Kali Krukut sampai Kali Sunter sebesar lebih dari satu juta gulden, Batavia, 1919
 Sumber: ANRI, Algemene Secretarie Besluit No. 30 November 1919

Angke. Kemudian, limpahan debit air yang melalui 13 sungai tersebut akan dibuang melalui sisi kiri dan kanan Batavia ke laut.

Konsep van Breen memerlukan

perhitungan cermat dan pelaksanaannya membutuhkan biaya tinggi. Pada intinya, konsep van Breen adalah mengendalikan aliran air dari hulu sungai dan membatasi volume air masuk Batavia. Oleh karena itu, perlu dibangun saluran-saluran pengumpul air di pinggir selatan Batavia untuk menampung limpahan air, dan selanjutnya dialirkan ke laut melalui tepian barat kota. Saluran pengumpul air yang dibangun itu kini dikenal sebagai Banjir Kanal Barat yang memotong Batavia dari Pintu Air Manggarai bermuara di kawasan Muara Angke. Manggarai dijadikan titik awal karena daerah itu merupakan batas selatan kota yang masih cukup aman dari gangguan banjir sehingga memudahkan pengendalian air di musim hujan.

Banjir Kanal Barat mulai dibangun tahun 1922 dan dikerjakan secara bertahap, mulai dari Pintu Air Manggarai ke arah barat, memotong Sungai Cideng, Krukut, Grogol, sampai ke Muara Angke. Untuk mengatur debit aliran air ke dalam Batavia, banjir Kanal Barat dilengkapi beberapa pintu

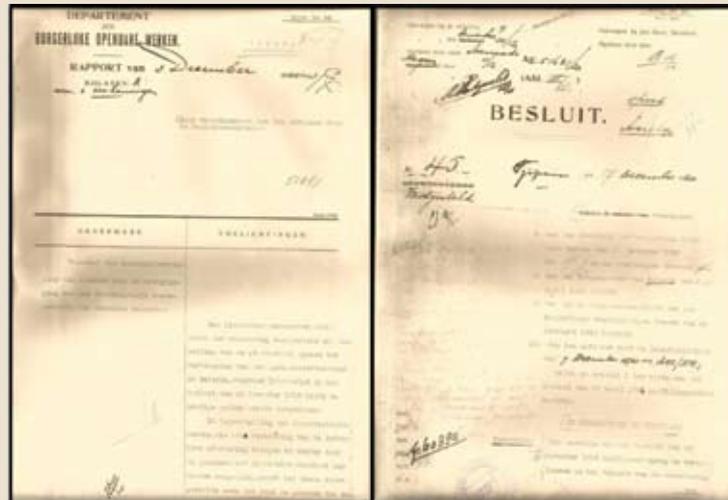


Pembangunan banjir kanal di Oude Tamarindelaan (sekarang Jl. KH Wahid Hasyim) dekat Kebon Sirih, [1920]
 Sumber: ANRI, KIT Batavia No. 531/87

KHAZANAH

air, termasuk Pintu Air Manggarai untuk mengatur debit air Kali Ciliwung Lama, dan Pintu Air Karet, untuk membersihkan Kali Krukut Lama dan Kali Cideng Bawah. Dengan adanya Banjir Kanal Barat, beban sungai di utara saluran pengumpul air relatif terkendali. Penetapan Manggarai sebagai titik awal dikarenakan saat itu, wilayah ini merupakan batas selatan kota yang relatif aman dari gangguan banjir sehingga memudahkan sistem pengendalian aliran air saat musim hujan.

Pintu Air Manggarai berada di daerah Manggarai, sebagai pengatur aliran air yang akan memasuki Kanal Banjir Barat. Pintu air ini merupakan bagian dari pengendalian banjir di Ciliwung dengan mengalihkan air ke bagian luar Batavia, melewati kanal dari Manggarai, di kawasan selatan Jakarta sampai ke Muara Angke di pantai utara. Setelah dari pintu air Manggarai, air akan mengalir ke Pasar Rumput, Dukuh Atas, lalu membelok ke arah barat laut di daerah Karet Kubur, kemudian dilanjutkan ke arah Tanah Abang, Tomang, Grogol,



Korespondensi antara BOW dan Gubernur Jenderal mengenai bantuan anggaran yang dikonsepsikan oleh Herman van Breen, Cipanas, 1920
Sumber: ANRI, Algemene Secretarie Besluit No. 45 tanggal 17 Desember 1920

Pademangan, dan berakhir di sebuah penampungan air di daerah Pluit.

Dalam menyusun konsepnya, Herman van Breen tampak sadar bahwa banjir yang selalu mengancam Batavia tak akan teratasi jika hanya

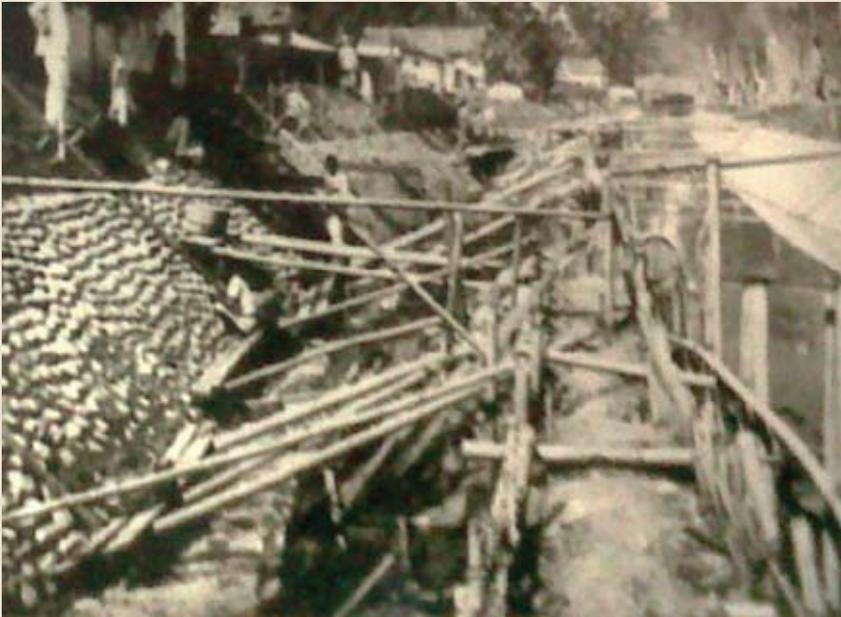
memperbaiki sistem tata air di dalam kota. Karena itu pencegahan di daerah hulu pun harus dikelola terpadu. Van Breen pun mengungkapkan upaya mengatasi banjir dengan cara mengendalikan banjir sekaligus mengamankan kebutuhan air di musim kemarau, mengeringkan lahan-lahan genangan di wilayah kota serta pembukaan air permukaan dan limbah. Oleh karena itu, untuk mengendalikan aliran di daerah hulu perlu dibangun beberapa bendungan untuk penampungan sementara, sebelum air dialirkan ke hilir. Sebagai implementasi dari rencana pencegahan di daerah hulu, dibangun dua bendungan yakni



Banjir kanal di Weltevreden (sekarang di daerah Monas, Lapangan Banteng, dan Gunung Sahari), [1920]
Sumber: ANRI, KIT Batavia No. 529/04



Saluran air yang telah dikerjakan di Batavia, [1920]
Sumber: ANRI, KIT Batavia No.142/05



Saluran air dari Tanah Abang ke Weltevreden (sekarang di daerah Monas, Lapangan Banteng, dan Gunung Sahari), [1920]
Sumber: ANRI, KIT Batavia No.534/13



Saluran air di atas Kali Ciliwung di daerah Manggarai yang merupakan aliran air dari Tanjung Priok ke Meester Cornelis (sekarang Jatinegara), [1920]
Sumber: ANRI, KIT Batavia No.520/10



Pintu Air Manggarai yang telah selesai dibangun, Batavia, [1920]
Sumber: ANRI, KIT Batavia No.530/34

Bendungan Katulampa di Ciawi, dan Bendungan Empang di hulu Sungai Cisdane.

Bendungan Katulampa atau Katoelampa-dam merupakan bagian dari sistem tata kelola perairan pemerintah Belanda untuk pengendalian banjir agar Batavia sebagai ibu kota negara terbebas dari kemungkinan banjir. Dari Katulampa, sebagian air Ciliwung dialirkan lewat pintu air ke Kali Baru Timur, saluran irigasi yang dibangun pada waktu yang sama. Dari Bogor bagian timur, sungai buatan itu mengalir ke Batavia,

melalui Cimanggis, Depok, Cilangkap, sebelum akhirnya bermuara di daerah Kali Besar, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kontribusi Herman van Breen dalam mengatasi banjir di Batavia begitu besar sehingga membuat Batavia terhindar dari banjir. Jika dibandingkan Batavia, Jakarta memang sudah jauh berbeda. Luas wilayahnya semakin besar, penduduk semakin bertambah, pembangunan di berbagai sektor juga semakin pesat sehingga mempersempit daerah resapan air yang mengakibatkan banjir

semakin sulit dihindari. Tetapi tentunya hal tersebut tidak dibiarkan. Konsep-konsep seperti yang dikemukakan oleh Herman van Breen harus mulai diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan mempelajari konsep Herman van Breen dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan Jakarta sekarang akan tercipta konsep baru dalam mencegah banjir. Pencegahan banjir yang dikonsepsikan oleh van Breen tentu tidak hanya dapat mengatasi banjir di Batavia tapi di seluruh Indonesia. Namun konsep tersebut tidak serta merta diimplementasikan melainkan disesuaikan dengan keadaan alam masing-masing daerah. Dengan analisis yang lebih dalam dan merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh van Breen, pencegahan banjir di Indonesia tidak menutup kemungkinan dapat terlaksana dengan lebih baik.



Tyanti Sudarani :

GEMPA BUMI DI NEGERI CINCIN API

Jika diumpamakan tangan seorang gadis, Indonesia adalah jari manis yang dilingkari sebuah cincin. Namun demikian cincin ini bukanlah sembarang cincin. Di balik indahnya cincin tersebut ternyata menimbulkan banyak bencana. Cincin ini dikenal dengan sebutan *The Ring of Fire* atau cincin api. Nama yang sebenarnya indah, tetapi di situlah letak bahayanya. Cincin Api ini terjadi akibat langsung dari lempeng tektonik dan pergerakan serta tabrakan dari lempeng kerak bumi.

Daerah Cincin Api Pasifik berbentuk U atau tapal kuda dengan panjang sekitar 40.000 km. Letaknya sering kali dikaitkan dengan palung samudera, sabuk vulkanik dan pergerakan lempeng kerak bumi yang letaknya saling berdekatan dan terjadi

secara terus menerus. Cincin Api Pasifik memiliki sekitar 452 gunung berapi dan lebih dari 75% gunung berapi aktif dan tidak aktif di dunia terletak di wilayah ini. Banyaknya gunung berapi ini mengakibatkan Cincin Api Pasifik merupakan daerah yang sering kali mengalami letusan gunung berapi dan gempa bumi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini sering disebut juga sebagai sabuk gempa Pasifik (*circum - Pacific belt* atau *circum - Pacific seismic belt*) dan merupakan jalur gempa paling aktif di dunia. Sekitar 90% gempa bumi di dunia terjadi di kawasan Cincin Api Pasifik, dan 81% gempa bumi terbesar di dunia juga terjadi di kawasan ini.

The Ring of Fire

Di balik kisah sebagai negeri

Zamrud Khatulistiwa yang dikaruniai kekayaan alam dan tanah yang subur ternyata Indonesia banyak menyimpan potensi bencana alam. Masyarakat yang hidup di dalamnya ibarat bernapas di tengah lingkaran api. Hal ini disebabkan negara kita terletak dalam jalur "*the ring of fire*", kawasan Pasifik yang merupakan zona teraktif dengan deretan gunung vulkanis aktif di dunia. Oleh karenanya daerah yang berada dalam lingkaran api Pasifik ini menjadi daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Di Indonesia wilayah cincin api Pasifik terbentang sepanjang kepulauan timur laut berbatasan langsung dengan New Guinea dan di sepanjang sabuk Alpide Selatan dan barat yang terbentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Flores, dan Timor. Selain itu, Indonesia

juga berada di wilayah terjadinya tumbukan tiga lempeng benua yaitu Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Lempeng benua ini sewaktu-waktu akan bergeser patah sehingga menimbulkan gempa bumi.

Apabila terjadi tumbukan antar lempeng tektonik dapat menghasilkan tsunami, seperti yang terjadi di Sumatera pada 25 November 1833. Gempa bumi ini disebabkan oleh pecahnya segmen Palung Sumatera sepanjang 1000 km di sebelah tenggara. Gempa ini kemudian memicu terjadinya tsunami yang menerjang pesisir barat Sumatera dengan wilayah terdekat dari pusat gempa adalah Pariaman hingga Bengkulu. Tsunami juga menyebabkan kerusakan parah di Maladewa dan Sri Lanka. Selain itu, tsunami juga mencapai Australia bagian utara, Teluk Benggala, dan Thailand meskipun dalam intensitas kecil. Bencana ini tidak terdokumentasi dengan baik sehingga tidak diketahui dengan pasti dampak dan korbannya.

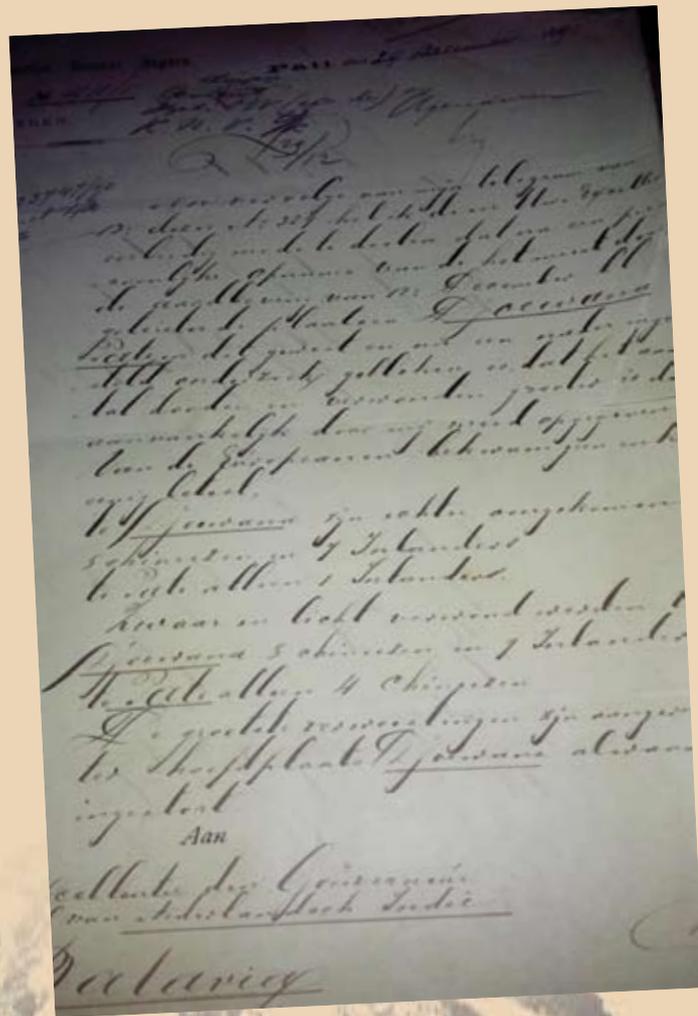
Tumbukan ketiga lempeng benua tersebut pada akhirnya membentuk rangkaian gunung api di Indonesia. Di Indonesia terdapat sekitar 154 gunung berapi atau sekitar 13% dari seluruh gunung api di dunia yang terbentang dari Pulau Sumatera menyusuri Pulau Jawa kemudian menyeberang ke Bali, Nusa Tenggara hingga bagian timur Maluku dan berbelok ke utara Pulau Sulawesi. Sekitar 12 tempat di Indonesia termasuk dalam kawasan Cincin Api Pasifik, yaitu Gunung Tambora (Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat), Toba-Sibayak-Sinabung-Tarutung (gunung api dan sesar tektonik di Sumatera Utara), Gunung Krakatau (gunung api bawah laut di Selat Sunda), Gunung Agung-Batur-Rinjani (Bali, Lombok), Gunung Semeru-Penanggungan-Bromo-Ijen-Kelud (Jawa Timur), Gunung

Merapi-Merbabu-Lawu-Sindoro-Sumbing-Dieng (Jawa Tengah), Gunung Tangkuban Perahu-Salak-Papandayan-Galunggung (Jawa Barat), Gunung Kerinci-Dempo-Sorik Merapi (Sumatera), Gunung Rokatenda-Egon-Lewo-Tobi-Ende-Larantuka (Nusa Tenggara Timur), Sangihe-Ambon-Ibu-Saputan (Kepulauan Ambon), Liwang-Padang-Aceh-Palu (Sesar Darat), Mentawai-Nias-Simeulue (Pulau di batas benua).

Akibat banyaknya gunung berapi ini sering terjadi gempa bumi yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi, seperti letusan Gunung

Krakatau pada 26 s.d. 27 Agustus 1883 yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dan memberikan perubahan iklim global. Letusan tersebut dianggap bertanggung jawab atas terjadinya enam tahun musim dingin di wilayah Eropa. Letusan supervulkanik yang diperkirakan terjadi pada 74000 SM menyebabkan terbentuknya Danau Toba. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 merupakan salah satu letusan terdahsyat yang tercatat dalam sejarah.

Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa



Gempa bumi di Djoewana, Pati (Tzg Ag No.37790 tahun 1892).

KHAZANAH

28 wilayah di Indonesia dinyatakan sebagai daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Di antaranya adalah Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Selatan, Jawa Timur bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan di Kalimantan Timur. Daerah yang aman dari bencana gempa bumi meliputi pantai timur Sumatera (Riau, sebagian Jambi, Sumatera Selatan), Laut Cina Selatan, Kalimantan dan Bagian utara Laut Jawa serta perairan Laut Arafuru sebelah Selatan Papua.

Gempa bumi yang kerap terjadi di Indonesia rupanya menarik minat beberapa peneliti. Junghun merupakan salah seorang peneliti yang pernah membuat statistik mengenai gempa bumi yang terjadi antara tahun 1586-1825. Berdasarkan catatannya kita dapat mengetahui gempa bumi penting yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu di Chirebon (1847), Amboina (1644, 1674, 1835, 1898), Molukken (1857), Ambarawa (1865, 1872), Midden Java (1867), Tjiandjoer (1879), Java's Eerste Punt (1880), Koepang (1892), Ceram (1899 disertai dengan Tsunami), Soekabumi (1900), Simeuloe (1907 disertai dengan Tsunami), Kerintji (1909), Sangir (1913), Benkoelen (1914). Majalah *Natuurk* dalam edisi ke-18 menyebutkan mengenai gempa bumi dan letusan gunung berapi yang terjadi selama tahun 1810-1850 dan 1951-1960.

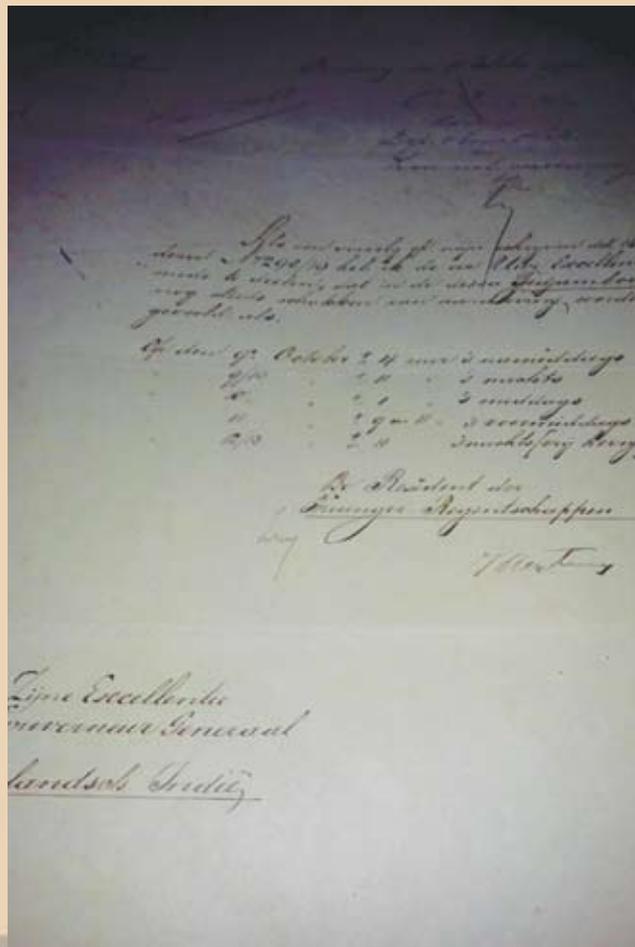
Gempa Bumi dalam Khazanah Arsip

Laporan-laporan mengenai terjadinya gempa bumi banyak disebutkan dalam berbagai khazanah

arsip residensi, misalnya arsip residensi Ambon, Banda, Timor, Preanger. Selain arsip residensi khazanah arsip yang menyebutkan mengenai gempa bumi adalah khazanah arsip *Algemene Secretarie* (1890-1941). *Algemene Secretarie* pada masa itu fungsinya sama dengan Sekretariat Negara pada masa sekarang. Nampaknya saat itu gempa bumi dianggap sebuah permasalahan yang penting sehingga setiap residen yang daerahnya tertimpa gempa bumi selalu memberikan laporan kepada Gubernur Jenderal. Berdasarkan arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa hampir setiap hari terjadi gempa bumi di wilayah Hindia Belanda,

terutama di bagian timur. Tidak jarang gempa ini mendatangkan kerugian materiil dan menimbulkan kematian.

Di dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie* terdapat beberapa pengelompokan masalah, misalnya mengenai *decentralisatie* (desentralisasi), *grongebied en bevolking* (wilayah dan penduduk), *spoorwegen* (perkeretaapian), *begrooting* (anggaran), *particuliere landerijen* (perkebunan swasta) dan sebagainya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan bencana alam terutama gempa bumi (*ardbevingen vulkanische werkingen*) ditangani oleh *Observatorium Koninklijke Magnetische Meteorologisch te Batavia* (fungsinya hampir sama dengan



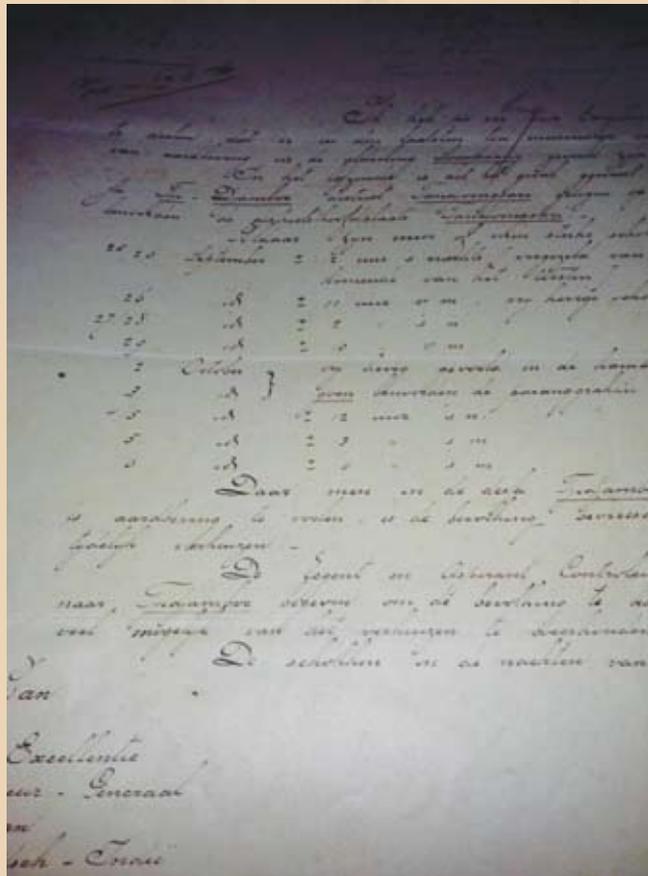
Laporan dari *Residen Preanger Regentshippen* kepada *Gouverneur General* tanggal 17 Oktober 1890 mengenai gempa yang terjadi di Desa Tjijamboe, *Afdeeling* Soemeding (Tzg Ag No.37790 tahun 1892).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada masa sekarang) yang berada di bawah *Geografische Dienst*. *Geografische Dienst* merupakan salah satu bagian dari *Departemen van Onderwijs, Eerdienst, en Nijverheid*.

Permasalahan mengenai gempa bumi dikelompokkan dengan judul permasalahan (*Hoofd Geografische Dienst*). Judul permasalahan ini merupakan jalan masuk bagi pengguna yang akan meneliti masalah gempa bumi yang terdapat dalam khazanah arsip *Algemene Secretarie*. Pengelompokan masalah ini juga memudahkan pengguna dalam melakukan penelusuran arsip *Algemene Secretarie*, karena langsung mengarah pada permasalahan yang akan diteliti.

Di antara sekian banyak arsip *Algemene Secretarie* tentang bencana alam disebutkan bahwa Residen Ambon pada 1 Februari 1892 melaporkan kepada Gubernur Jenderal terjadi gempa bumi di Kajeli selama dua menit pada 20 Desember 1891. Di Tjiamis pada 28 Desember 1891 tengah malam juga terjadi gempa bumi selama tiga menit. Gempa bumi ini pun terjadi di daerah Timor, Batavia, Buitenzorg, Serang, Palembang, Anyer, Lais Bengkulu, Makasar, Malang, Bali Lombok, Banda. Di beberapa daerah, seperti di Kajeli gempa bumi dalam setahun dapat terjadi lebih dari satu kali yaitu pada 21 Agustus 1891, 25 Oktober, 20 Desember 1891. Di Palembang pada 13, 18, 21 September 1891, 30 Desember 1891.

Pada 24 Juni 1891, 12 Desember 1891 di Lais Bengkulu terjadi gempa bumi (Tzg Ag No.402 tahun 1892). Di daerah Djowana, Pati, gempa bumi bahkan menimbulkan kematian dan luka-luka. Di Djowana akibat gempa tersebut 5 orang Cina dan 7 pribumi



Laporan dari Residen Preanger Regentschappen kepada Gouverneur General tanggal 17 Oktober 1890 mengenai gempa yang terjadi di Desa Tjijamboe, Afdeeling Soemedang (Tzg Ag No.37790 tahun 1892).

meninggal dan yang terluka berat 7 orang Cina dan 9 orang pribumi. Sementara itu di Pati akibat gempa tersebut 1 orang pribumi meninggal dan 4 orang Cina terluka berat (Tzg Ag No.37790 tahun 1892).

Dalam *Algemene Secretarie* juga terdapat laporan dari Residen *Preanger Regentschappen* kepada *Gouverneur General* tentang gempa bumi yang terjadi di Desa Djidjamboe afdeeling Soemedang pada 25 s.d. 29 September 1890. Gempa bumi tersebut berlanjut pada tanggal 2, 3, 5 Oktober 1890. Pada tanggal 9 sampai 13 Oktober 1890 terjadi lagi gempa bumi di desa tersebut. Lamanya gempa yang terjadi berkisar antara 2 s.d. 5 menit dan gempa dapat terjadi di siang hari, petang, malam

bahkan menjelang pergantian hari. Namun demikian, dalam laporan ini tidak secara rinci menyebutkan jumlah kerugian materiil dan korban.

Berdasarkan arsip yang ada, sebenarnya pemerintah dapat belajar cara menanggulangi bencana yang muncul silih berganti sehingga ketika bencana terjadi tidak perlu terjadi kepanikan. Kita dapat mengetahui bahwa sejak dahulu masyarakat negeri cincin api ini sudah akrab dengan bencana letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami. Di atas cincin api ini masyarakat tumbuh dan berkembang selama ratusan tahun sekaligus hidup berdamai dengan bencana tersebut. Namun, berpijak di atas Cincin Api bukanlah suatu hal yang menakutkan.



Gunung Krakatau dipayungi awan dan ditemani laut yang tenang.
KIT JB No. 0063/067

R. Suryagung SP :

MENGUAK MISTERI MELETUSNYA GUNUNG KRAKATAU 1883 MELALUI ARSIP

Ketika mendengar nama Krakatau atau Krakatoa, kita pasti langsung tertuju dengan sebuah gunung yang meletus tahun 1883. Menurut para Vulkanolog, Krakatau telah ada sejak masa purba dan tingginya mencapai 2000 meter dan diameter 11 km. Pada masa prasejarah, gunung ini meletus hingga runtuh dan tenggelam di bawah permukaan laut. Dari letusan tersebut muncullah Pulau Rakata, Pulau Sertung dan Pulau Panjang. Setelah terjadi beberapa kali letusan dari bawah permukaan laut, akhirnya muncul dua gunung berapi berbentuk kerucut. Kedua gunung ini diberi nama Gunung Api Perbutan dan Gunung Api Danan. Kemudian muncul satu lagi Gunung Api di sebelah selatan, yaitu Gunung Rakata. Ketiga gunung ini menyatu

dengan pulau rakata dan menjadi sangat luas. Pulau ini kemudian diberi nama Pulau Krakatau.

Pada tanggal 26 s.d. 27 Agustus 1883 Krakatau meletus. Letusan itu sangat dahsyat, awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Suara letusannya pun terdengar sampai di Alice Springs, Australia dan Pulau Rodrigues dekat Afrika, 4.653 km. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama dua setengah hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Menurut

berita, dalam berbagai koran pada waktu itu, banyaknya bahan letusan yang disemburkan oleh Krakatau ke angkasa diperkirakan mencapai 18 km³, tersebar di berbagai daerah seluas 827.000 km². Benda-benda yang berjatuhan itu bukan hanya berada dipulau Jawa dan Sumatera serta pulau-pulau sekitarnya saja tapi hingga kepulauan Kokos. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Bahkan *Guinness Book of Record* mencatat sebagai ledakan terbesar yang pernah terekam dalam sejarah manusia modern. Para peneliti juga mengategorikan letusan tersebut sebagai super volcano.

Gunung Krakatau dalam Khazanah Arsip

Imbas kekuatan letusan Gunung Krakatau tahun 1883, pada saat ini

dapat kita jumpai salah satunya di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sumber primer berupa laporan dari berbagai pimpinan daerah kepada pemerintah pusat baik tentang jangkauan sebar akibat letusan, kerusakan-kerusakan yang terjadi, penanganan, penyelamatan serta permohonan bantuan dari pusat, dan tindakan yang diambil dari pemerintah pusat untuk menanggulangi bencana maha dahsyat ini. Di samping itu dapat diperoleh pula informasi tentang laporan dari para nakhoda kapal yang kebetulan pada saat itu sedang berada di perairan Selat Sunda. Oleh karena mengalami langsung dan berada pada jarak dekat, maka laporan yang dibuat untuk Gubernur sangat detail.

Berdasarkan khazanah arsip mengenai peristiwa meletusnya Krakatau tahun 1883, dapat diketahui laporan-laporan sebagaimana akan diulas dalam tulisan ini.

Dahsyatnya Krakatau Tahun 1882

Menurut laporan Residen Hora Siccama, Krakatau kembali meletus pada 27 Agustus 1883 pada pukul 5 sore. Saat itu terdengar suara kanon yang menggetarkan. Pada jam 9 malam suara kanon tersebut kembali menghebat bahkan berlanjut saat jam 2 pagi. Saat itu turun hujan disertai gelap gulita, kantor-kantor tutup tidak dapat bekerja (*Grote Bundel Agenda* (GB Ag) 50441/1884 (Ag 28/8-16509). Dalam telegram Residen Bantam, melaporkan adanya muntahan lahar berkali-kali disertai belerang terus menerus. Selain itu ditambah kilat yang menyambar serta langit yang berwarna kelabu (GB Ag 5044a/1884 (Ag 28/8-16509). Sementara di wilayah Banten Utara, terjadi hujan abu dan lumpur hingga semuanya tertutup (GB Ag 5044a/1884 (Ag 28/8-16510). Sedangkan kabar dari Serang seluruh wilayahnya gelap gulita dan



Krakatau, daerah tempat orang-orang melabuhkan kapalnya, Lampung.
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) NO. 0973/063

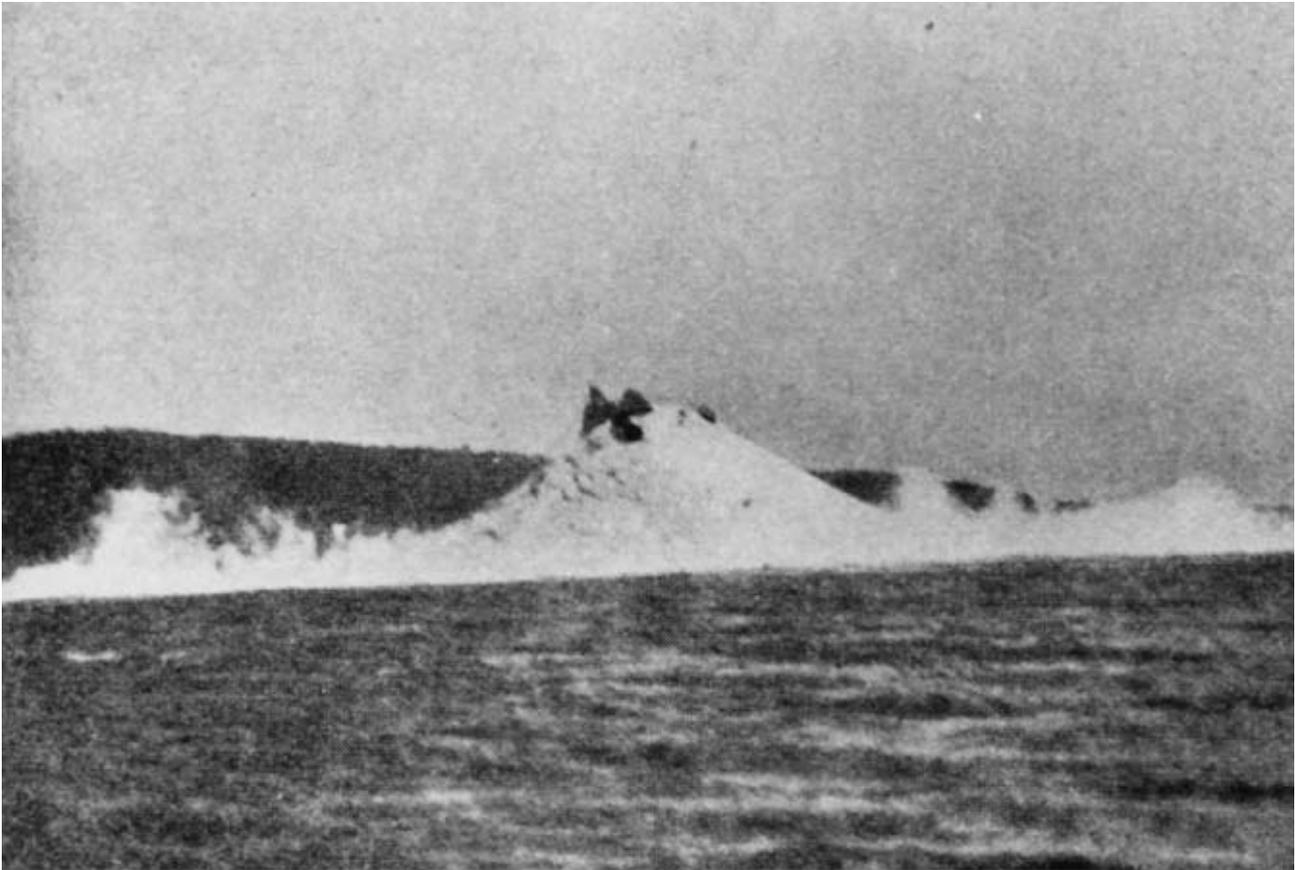
terdengar letusan hebat . (GB Ag 5044a/1884 (Ag 1/9-16876). Residen Madura dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal menyatakan akan adanya suara kanon berat dari arah barat. Suara ini terdengar antara lain di Bangkalan dan Pamekasan. (GB Ag 5044a/1884 (Ag 4/9-17037)

Menurut beberapa laporan, akibat letusan gunung Krakatau terjadi juga ombak besar (sekarang tsunami) yang menghanyutkan rumah dan warga. Seperti yang terjadi di perkampungan Eropa di Anyer dan perkampungan Cina di Merak dilanda gelombang besar (GB Ag 5044a/1884 (Ag 28/8-16510). Bahkan petangnya di kampung pecinan Merak, banyak orang hilang karena hanyut terbawa ombak (GB Ag 5044a/1884 (Ag 28/8-16510). Sedangkan Residen Karawang melaporkan adanya ombak besar di Cabang Bungin hingga setinggi 5 kaki (GB Ged Ag 5044a/1884). Sedangkan Residen Palembang mendapat kabar dari Kotabumi bahwa gempa laut telah memporandakan wilayah

Teluk Betung (GB Ag 5044a/1884 (Ag 17336/83).

Gelombang pasang letusan Krakatau ini juga membawa bencana bagi penduduk Batavia termasuk Tangerang. Gelombang pasang menggenangi daerah Batavia hingga taman Heemraden di kampung luar Batang (GB Ag 5044a/1884 (Ag 5447/1884). Pelabuhan Tanjung Priok keadaannya tidak lebih baik dari daerah-daerah lainnya. Seluruh pelabuhan tergenang air. Sebagian ketinggian air telah mencapai 235 di atas titik nol (= 20 meter), karena itu semua aparat dan pekerja segera meninggalkan pelabuhan. (GB Ag 5044a/1884 (Ag 15954). Kampung Pasir di Untung Jawa (Tangerang) bahkan lenyap hingga Ketapang di Tajung Kail, juga daerah Sembilang Laut, Cilincing lenyap ditelan ombak (GB Ag 5044a/1884 (Ag 6/917133).

Beberapa pulau di Kepulauan Seribu pun lenyap dari permukaan air laut. Di daerah Meester Cornelis terutama di Cabang Bungin, air laut



Anak Gunung Krakatau
KIT JB No. 0063/071

telah melenyapkan kampung Pondok Dua, Sambilangan, Pondok Tengah, Muara Gombong, Blaca, Blubuk dan Gaga (GB Ag 5044a/1884 (Ag 17133)).

Berbeda dengan daerah Mauk, Tanjung Rawa, Saban, Kanai yang porak poranda, di daerah Selatan hingga Karang Serang Dalam (GB Ag 5044a/1884)

Kerusakan dan Korban Krakatau Tahun 1883

Letusan Krakatau tahun 1883 mengakibatkan jatuhnya korban, yaitu sepuluh orang buruh dan mandor di Menara Pengawas Vlakkenhoek tewas, dua puluh delapan orang warga Kampung Blimbing tewas (GB Ag 5044a/1884 (Ag 17298/83)). Sementara menara mercusuar di Vlakkenhoek dan Teluk Betung

roboh. Di wilayah antara Sebesi dan Krakatau hanya tinggal air. Sebagian utara dan barat Banten berubah menjadi padang pasir, tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, banyak rakyat tewas. (Gb Ag 5044a/1884 (*Mailrapport* 752)). Sedangkan di wilayah Tanara 704 orang tewas dan 40 orang hilang akibat gelombang pasang (Gd Ag 5044a/1884 (Mailrapport 752)). Di pulau Damar banyak orang hilang (GB Ag 5044a/1884 (Afs Mail No.798)).

Selain korban jiwa, kerusakan lain pun terjadi, seperti di Distrik Cabang Bungin (Bekasi) yang menghilangkan 8 rumah (GB Ged Ag 5044a/1884). Rusaknya pohon, kebun dan tanaman di Banten Utara (GB Ag 5044a/1884 (A g 28/8-16510)). Bahkan di Cilacap, Residen Banyumas melaporkan terdamparnya kapal-kapal muatan

yang disusul dengan gelombang besar (GB Ag 5044a/1884). Sedangkan di Lampung banyak infrastruktur rusak parah akibat terjangan letusan Krakatau, antara lain jalan di sisi timur dan barat Teluk Lampung yang tertutup oleh batu apung, bangunan muka tertimbun, menara rusak, selebihnya sepanjang pantai porak-poranda. (GB Ag 5044a/1884 (Ag 17298/83)). Selain itu kehancuran juga dirasakan antara daerah Muara Dua dan Kota Bumi. Sedangkan di wilayah selatan Lampung, Palembang, Bengkulu dan Padang sedang diselidiki (GB Ag 5044a/1884 (*Mailrapport*752))

Akibat bencana tersebut, kapal pemerintah juga hilang, yaitu kapal "Burouw", dan kapal senjata (GB Ged Ag 5044a/1884 (GB 19233 19-9-1883)), Kapal Prins Hendrik, Kapal Ramtoun,



Peta Topografi Karesidenan Banten, 1922. Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda (lingkaran merah)
Peta Topografi 1899-1960, No. 161

kapal Argus (GB Ged Ag 5044a/1884 (Gb 14/9-17916).

Rekontruksi Infrastruktur

Setelah kerusakan terjadi dimana-mana terutama sekitar wilayah Lampung, Banten dan sekitarnya, maka mulailah dibangun kembali infrastruktur yang hancur, antara lain pembangunan kantor telegraf dan jalur telegram sepanjang 5 km (GB Ag 5044a/1884 (*Mailrapport*752))

Bantuan Dalam dan Luar Negeri

Melalui kapal Kediri dari Batavia dikirimkan sebanyak 700 pikul beras untuk rakyat Lampung, dikirim pula seorang dokter untuk memeriksa kesehatan rakyat di sana (GB Ged Ag 5044a/1884 (Ag 16758/83). Selain itu, 100 kojang beras diperoleh dari Ampenan untuk rakyat Banten dan Batavia. (GB Ged Ag 5044a/1884 (Ag 17165/83) dan 1000 pikul beras

dikirim untuk Teluk Betung (GB Ged Ag 5044a/1884 (Ag 17298/83).

Terdapat bantuan dari luar negeri yaitu 2 kapal perang Amerika Juanita 10 beserta 236 awak yang didatangkan dari Singapura kemudian berlayar ke Selat Sunda untuk memberikan pertolongan (GB Ged Ag 5044a/1884 (Ag 5/9-17367) Selain itu dikirim pula Kapal perang Inggris Champion (GB Ged Ag 5044a/1884 (Ag 5/9-17916).

Krakatau Saat Ini

Secara administratif, saat ini Gunung Krakatau masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sekarang Krakatau menjadi salah satu obyek tujuan wisata utama Provinsi Lampung.

Banyak akses menuju Krakatau. Bila kita dari Banten kita bisa naik kapal ferry (Roro) dari pelabuhan Merak Cilegon menuju Pelabuhan Bakauheni

Lampung selama 2.5 jam. Dapat pula ditempuh dari Merak menggunakan Bis menuju Kalianda, dilanjutkan perjalanan menuju dermaga desa Canti selama 10 menit kemudian menggunakan perahu motor menuju Kepulauan Krakatau. Selain itu, kita juga dapat mengakses lewat Pantai Anyer, Carita maupun Tanjung Lesung dengan *speedboat* selama 2 jam.

Sekalipun tandus, namun kawasan Krakatau menyimpan berbagai flora seperti kelapa, cemara, ketapang, dan lain-lain. Sedangkan fauna terdapat biawak, penyu, ular piton, kalong, kadal, burung raja udang, kupu-kupu dan sebagainya. Bila gunung Krakatau sudah seabad tidak aktif, Gunung Anak Krakatau masih aktif dan bahkan pernah meletus beberapa kali. Saat ini kita hanya mendekati bila memperoleh izin dari petugas. (agg)



Kris Hapsari & Nia Pertiwi :

BENCANA KELAPARAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN DALAM KHAZANAH ARSIP

Kempen 541023 NN 2-5

Dalam ensiklopedi bencana yang mencatat bencana-bencana terburuk dalam sejarah dunia, bencana kelaparan tidak disebutkan sebagai bagian dari bencana yang lazim dikenal, seperti gempa bumi, bencana penyakit, banjir, gunung meletus dan yang terakhir adalah tsunami (Farah Amalia, hal. 11). Sungguhpun demikian, kejadian kelangkaan pangan yang berakibat pada kurangnya pasokan makanan masyarakat berpotensi menjadi bencana kelaparan dan memicu timbulnya penyakit. Bersama-sama dengan sandang dan papan, pangan merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi untuk dapat bertahan hidup. Ketiga hal tersebut menjadi elemen pengukur kesejahteraan suatu masyarakat sekaligus keberhasilan

sebuah rezim dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Bencana kelaparan yang terjadi di berbagai daerah Hindia Belanda salah satunya disebabkan oleh gagal panen yang diakibatkan karena kurangnya pasokan air untuk mengairi lahan persawahan, terutama saat musim kemarau tiba. Sebenarnya, pemerintah kolonial telah menerapkan sistem irigasi di beberapa daerah yang berada di Pulau Jawa, seperti Banten dan Batavia yang berfungsi untuk mengairi dan menjaga debit air lahan persawahan sebagai usaha peningkatan produksi pangan dalam mencukupi kebutuhan pangan, khususnya di daerah rawan bencana kelaparan. Walaupun demikian, ternyata bencana kekurangan pangan tetap terjadi di berbagai daerah. Salah satu wilayah yang pernah mengalami

persoalan ketersediaan pangan adalah sebagian dari pulau Lombok. Daerah ini merupakan wilayah yang dalam catatan sejarah teridentifikasi sebagai daerah rawan pangan, menjelang periode akhir pemerintahan kolonial Belanda.

Bencana Kelaparan di Lombok

Ancaman kekurangan pangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan masalah baru. Negeri yang disebut-sebut sebagai negeri subur-gemah ripah loh jinawi tersebut ternyata di beberapa wilayahnya sejak lama menyimpan potensi kekurangan pangan.

Verslag van een dienstreis naar het eiland Lombok van 23 tot 27 April 1940 Inspecteur van den Dienst der Volksgezondheid over hongersnood (Laporan perjalanan dinas Inspektur

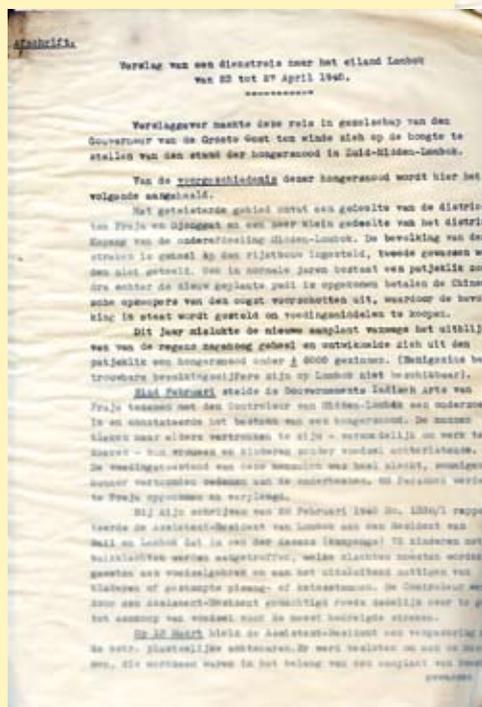
Dinas Kesehatan Masyarakat ke Pulau Lombok tanggal 23 s.d. 27 April 1940) menyebutkan bahwa perjalanan dinas *Inspecteur van den Dienst der Volksgezondheid* yang dilakukannya bersama dengan *Gouverneur van de Groote Oost* (Gubernur Timur Besar) adalah dalam rangka kunjungan untuk meninjau bencana kelaparan yang terjadi di bagian selatan Pulau Midden-Lombok (Lombok Tengah). Daerah atau wilayah bencana kelaparan meliputi sebagian dari distrik Praja dan Djonggat serta sebagian kecil wilayah Kopang yang terletak di *onderafdeeling Midden-Lombok*.

Laporan tersebut memberikan informasi mengenai penyebab pakeklik yang terjadi di tiga distrik di wilayah Lombok. Dalam laporannya, *Inspecteur van den Dienst der Volksgezondheid* menyampaikan bahwa sesungguhnya penduduk Midden-Lombok juga menanam padi, tetapi pada tahun-tahun normal (periode umum tanpa bencana) yang oleh *Inspecteur van den Dienst der Volksgezondheid* disebut sebagai *normale jaren*, di Lombok juga tetap terjadi apa yang disebut pakeklik. Identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Lombok telah menemukan beberapa faktor penyebab bencana kelaparan. Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya pakeklik (pakeklik bahkan terjadi segera setelah penanaman padi) yaitu ketika *Chinese Opkoopers* – pemborong/pengijon Cina memberi uang

kehidupan sehari-hari, penduduk Midden-Lombok tidak memiliki persediaan makanan lagi.

Faktor kedua yang menjadi penyebab rawan pangan berkaitan dengan faktor alam, yaitu kekeringan. Pada tahun 1940 penduduk/petani Midden-Lombok gagal panen karena minimnya curah hujan. Kekeringan yang melanda Pulau Lombok mengakibatkan petani mengalami kekurangan pangan sebagai akibat gagal panen. Jumlah keluarga yang mengalami kelaparan mencapai sekitar 6000 keluarga.

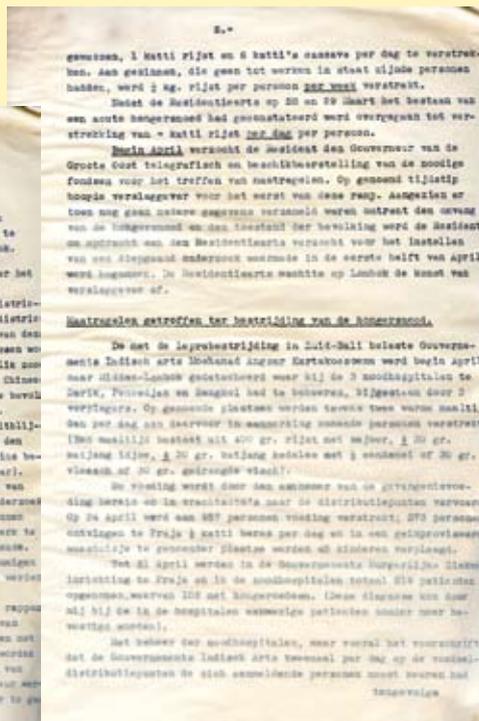
PENANGANAN BENCANA



Laporan perjalanan dinas ke Pulau Lombok tanggal 23 s.d. 27 April 1940 yang dilakukan oleh *Inspecteur van den Dienst der Volksgezondheid* (Inspektur Dinas Kesehatan Masyarakat) bersama dengan *Gouverneur van de Groote Oost* (Gubernur Timur Besar) untuk meninjau bencana kelaparan, khususnya di *onderafdeeling Midden-Lombok* (Lombok-Tengah) sekaligus melakukan tindakan untuk mengatasi bencana kelaparan di daerah tersebut melalui pemberian bahan pangan dan perawatan di rumah sakit kepada para korban kelaparan (Sumber: ANRI, *Binnenlandsch Bestuur* No. 1277).

Penanganan Bencana Kelaparan di Lombok Tahun 1940

Pada akhir Februari 1940 pemerintah kolonial Belanda melakukan penelitian mengenai permasalahan kelaparan di Lombok. Dokter pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke setiap tempat di wilayah bencana kelaparan mencatat bahwa pria-pria di wilayah Lombok pergi ke suatu tempat (diduga untuk mencari pekerjaan) tanpa meninggalkan makanan bagi anak-istrinya. Hal ini menyebabkan sebagian dari mereka menderita penyakit beri-beri. Bahkan, 83 orang harus dibawa dan dirawat di rumah sakit di Praja.



Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial yang dituangkan dalam laporan tanggal 28 Februari 1940 No. 1338/1, Asisten Residen Lombok menyampaikan kepada Residen Bali-Lombok bahwa di suatu dusun sekitar 75 anak mengalami keluhan di perutnya yang disebabkan karena kekurangan makanan dan pada tahap selanjutnya menimbulkan penyakit busung lapar atau dalam istilah Belanda disebut *hongerudeem*. Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa asupan makanan mereka hanya berupa dedaunan serta batang pisang atau batang pepaya yang ditumbuk. Untuk mengatasi masalah tersebut Asisten Residen memberi kewenangan kepada *Controleur* melakukan pembelian bahan makanan untuk daerah-daerah yang terancam bencana.

Banyaknya penderita *hongerudeem* di wilayah *Midden-Lombok*, mendorong Asisten Residen mengadakan rapat dengan pejabat daerah terkait pada tanggal 13 Maret 1940. Rapat tersebut memutuskan untuk memberikan bantuan pangan kepada laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan penanaman panen yang gagal, berupa 1 kati beras dan 6 kati singkong per hari, sedangkan kepada keluarga yang tidak terlibat dalam pekerjaan penanaman panen yang gagal, diberikan $\frac{1}{2}$ kati beras per minggu per orang. Jumlah bantuan segera ditingkatkan setelah dokter keresidenan melakukan peninjauan dan mendapati bencana kelaparan yang parah di wilayah itu. Sebagai tindak lanjutnya, maka diputuskan untuk memberikan bantuan makanan sebanyak 1 kati beras per hari kepada setiap orang.

Penanganan bencana kelaparan di *Midden-Lombok* tahun 1940 melibatkan seorang dokter bumiputra

yang dikirim oleh pemerintah kolonial untuk ikut membantu menangani bencana kelaparan di wilayah itu. Dokter bumiputra tersebut, Moehamad Angsar Kartakoesoema, memulai perjalanannya ke daerah *Midden-Lombok* bagian selatan pada awal April 1940 dan ditugaskan untuk mengawasi tiga wilayah yakni Darik, Panundjak dan Sengkol. Dibantu dengan tiga perawat laki-laki, dokter tersebut membagikan makanan dua kali sehari dengan menu masing-masing berupa 400 gram nasi dengan sayur, 30 gram kacang ijo, kurang lebih 30 gram kacang kedelai dengan $\frac{1}{2}$ butir telur itik atau 30 gram daging atau 30 gram ikan kering. Distribusi bantuan makanan dilakukan oleh penyuplai yang mengurus jatah makanan para tahanan dan didistribusikan menggunakan mobil barang.

Pada 24 April 1940 bantuan makanan untuk 957 orang telah didatangkan ke *Midden-Lombok*. Sementara, di daerah Praja sebanyak 373 orang mendapat pembagian jatah $\frac{1}{2}$ kati beras per hari, demikian juga dengan 45 anak-anak yang tinggal di rumah yatim turut mendapat bantuan makanan. Sampai dengan tanggal 21 April 1940, jumlah pasien penderita yang dibawa ke rumah sakit umum pemerintah di Praja dan *noodhospitalen* (rumah sakit bencana) mencapai 219 orang, 102 di antaranya didiagnosa positif sebagai penderita busung lapar.

Hal terpenting dalam penelitian yang dilakukan di wilayah bencana kelaparan tersebut adalah menemukan penderita kurang pangan di beberapa kampung di *Midden-Lombok* dan memberikan bantuan penanganan secepat mungkin. Hasil kunjungan peneliti di sebuah desa kecil yang berjarak sekitar 3 km dari desa tempat pendistribusian makanan (desa Sengkol) ditemukan 20 rumah yang

tidak memiliki persediaan makanan, mereka hanya makan batang pisang dan daun pepaya. Demikian pula di desa Tanahawoe, para peneliti mengumpulkan 145 anak-anak dan 102 orang dewasa, dan dari 46 orang yang dijadikan responden 22 di antaranya menunjukkan tanda kekurangan pangan. Dalam kunjungan penelitian di desa Rebile dikumpulkan 41 orang dewasa dan 41 anak-anak, dan di antara 27 orang responden yang dijadikan sampel penelitian, 12 orang di antaranya adalah penderita busung lapar, 5 di antaranya masuk dalam kategori parah.

Diversifikasi Tanaman Pangan di Hindia Belanda

Kenyataan bahwa beberapa wilayah di Hindia Belanda sering dihadapkan pada persoalan pemenuhan kebutuhan pangan agaknya menjadikan pemerintah kolonialberpikirkembangkan aneka jenis tanaman pangan selain padi. Identifikasi terhadap wilayah yang tidak mampu memenuhi lumbung pangannya sendiri menunjukkan bahwa wilayah tersebut sebenarnya menyimpan potensi pengembangan tanaman pangan di luar tanaman padi. Oleh karena itu, ketidakmampuan swasembada pangan di beberapa wilayah disikapi oleh pemerintah kolonial dengan usaha nyata, yakni kegiatan pertanian yang mendorong penduduk bumiputra ke arah pembudidayaan jenis-jenis tanaman pangan yang lain. Beberapa contoh di bawah ini memberikan gambaran mengenai usaha diversifikasi tanaman yang pernah dilakukan di Hindia Belanda.

Di Batavia, sekarang kita kenal dengan sebutan Jakarta, keterbatasan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan padimendorong pemerintah kolonial untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman yang sesuai

dengan kondisi wilayah ini, seperti buah-buahan dan singkong. Catatan yang ditinggalkan oleh Residen Batavia P.H. Willemse dalam *Memorie van Overgave October 1931* (Memori Serah Terima Jabatan bulan Oktober 1931) menyebutkan, bahwa salah satu faktor penyebab ketidakmampuan Batavia memenuhi kebutuhan sendiri adalah munculnya penyakit tanaman padi yang disebabkan oleh kekurangan air. Sebagai akibatnya, produksi padi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat bumiputra di wilayah Batavia, sehingga wilayah tersebut harus memasok padi dari luar wilayah tersebut. Berbeda dengan wilayah subur yang lain, sawah-sawah di Batavia hanya mampu menghasilkan padi per bau (1 bau=7096,50 m²) rata-rata 15-30 pikul. Sementara di beberapa wilayah yang berdekatan dengan Batavia seperti distrik Bekasi dan Cikarang dapat menghasilkan padi sebanyak 30-40 pikul per bau. Oleh karena itu, pemerintah melakukan usaha peningkatan kuantitas produksi tanaman pangan di Batavia.

Peningkatan kuantitas produksi tanaman pangan di Batavia, khususnya di beberapa wilayah yang tanah pertaniannya merupakan '*droge gronden*' – tanah kering – dilakukan oleh penduduk bumiputra melalui penanaman jenis padi yang tahan kekurangan air, yaitu padi jenis tipar serta tanaman singkong yang menjadi tanaman pilihan ke dua. Di samping itu, sesuai dengan anjuran pemerintah kolonial, usaha pemenuhan kebutuhan pangan juga dilakukan dengan menggiatkan budi daya tanaman buah-buahan di berbagai distrik di Batavia. Pohon buah-buahan banyak dibudidayakan di lahan-lahan perkebunan dan di halaman sekitar rumah, terutama di *onderdistrict* Pasar Minggu, Pasar Rebo, dan Kebayoran yang merupakan bagian dari distrik

Meester Cornelis. Perkebunan ini digarap secara intensif sehingga tidak hanya mencukupi kebutuhan buah-buahan di Batavia dan sekitarnya tetapi juga dapat dipasok hingga ke luar pulau.

Sebagai langkah menjaga kontinuitas produksi buah-buahan, maka pengembangbiakan tanaman buah dilakukan dengan menghitung rasio jumlah tanaman, yakni setiap 23 pohon tanaman tua disediakan 15 tanaman muda sebagai bibit atau tanaman pengganti. Tanaman pisang tidak disebut dalam jenis pohon yang dipersiapkan regenerasi penanamannya, barangkali hal tersebut disebabkan oleh mudahnya tunas baru tanaman pisang tumbuh dengan sendirinya.

Sebagai hasil keseriusan budi daya tanaman buah, maka panen buah-buahan di beberapa distrik di wilayah Batavia mencapai jumlah yang sangat besar, yakni f 1.900.000 per tahun. Oleh karena jumlahnya yang sangat melimpah, maka produksi buah tersebut bukan saja mampu mencukupi kebutuhan konsumen di wilayah Batavia, tetapi juga dikirim ke luar wilayah Batavia dengan menggunakan kereta api, melalui stasiun Pasar Minggu, Manggarai dan Kebayoran. Bahkan pada pada sekitar bulan Januari dan Februari 1927 sebagaimana yang dilaporkan oleh Residen Batavia P.H. Willemse, beberapa distrik di Batavia memperoleh hasil produksi buah-buahan yang luar biasa, yaitu mencapai 6 juta kg, dengan nilai ekonomis tidak kurang dari f 1.300.000. Untuk menjaga stabilitas produksi buah, *Gewestelijke Raad van Batavia* (Dewan Daerah Batavia) mengeluarkan peraturan yang mengharuskan rakyat pribumi untuk merawat pohon buah-buahan, dan melarang penduduk untuk menebang tanaman miliknya.

Tidak jauh berbeda dengan wilayah Batavia, usaha diversifikasi tanaman pangan juga dilakukan di *onderdistrict Tjiruas*, Keresidenan Banten. Jika di Batavia tanaman buah-buahan menjadi tanaman pangan pengganti yang penting, selain padi tipar dan singkong, maka di Ciruas tanaman singkong, yang merupakan bahan baku tepung tapioka menjadi tanaman primadona untuk mengatasi kekurangan pangan pada bulan-bulan paceklik (*Memorie van Overgave van Resident Banten, F.G. Putman Craemer*, Februari 1931). Penanaman pohon singkong umumnya dilakukan di antara padi gogo dan baru ditanam satu sampai dengan dua bulan setelah benih padi disebar.

Menyimak kasus bencana kelaparan yang pernah terjadi di Hindia Belanda sebagaimana kasus Lombok di atas, maka diperlukan kebijakan pangan yang baik dalam mengakomodasi pemenuhan kebutuhan pangan di seluruh wilayah Hindia Belanda. Sementara contoh kasus diversifikasi tanaman pangan model Batavia yang lebih mengedepankan tanaman buah dan model Tjiruas yang lebih mengutamakan budi daya tanaman singkong, dapat dijadikan bahan pembelajaran yang sangat baik bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam usaha yang berkaitan dengan swasembada pangan, demi meminimalisir keadaan rawan pangan pada masa sekarang dan masa mendatang.

Mudanto Pamungkas :

DINAMIKA KAWASAN PERBATASAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT



Suasana di terminal bus Entikong, karena jumlah armada bus masih terbatas maka moda transportasi baru jalan ketika penumpang sudah penuh.

Mungkin sebagian besar dari kita masih asing ketika mendengar nama daerah Entikong. Entikong merupakan nama sebuah desa di tepi Sungai Sekayam, Kalimantan Barat. Secara administratif desa Entikong berada di bawah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Kecamatan Entikong sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sekayam pada tahun 1997. Dengan demikian di wilayah Kabupaten Sanggau terdapat dua kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Sarawak, Malaysia, yaitu Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam. Tim Sejarah Lisan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkesempatan mengunjungi Kecamatan Entikong dan Sekayam pada pertengahan bulan Juli 2012. Untuk mencapai Entikong diperlukan waktu selama kurang lebih enam jam dari kota Pontianak dengan menempuh jarak 313 km.

Menurut penuturan Kepala Desa Entikong, Raden Nurdin, nama Entikong bermula dari letak desa itu yang berada di tikungan Sungai Sekayam. Masyarakat setempat menyebut tikungan dengan dialek Melayu, “tekong.” Namun ketika pemerintah membangun gapura di perbatasan nama yang tertulis adalah Entikong. Sejak itu, masyarakat setempat dan para pendatang menyebut daerah perbatasan itu sebagai Entikong.

Desa Entikong memiliki luas 110,98 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 6.782 jiwa. Desa tersebut terbagi dalam lima dusun, yaitu dusun Entikong, Sontas, Peripin, Merau, dan Serangkang. Jika melihat kondisi geografisnya maka sektor perekonomian yang potensial dikembangkan di kawasan Entikong adalah perkebunan. Saat ini, penduduk setempat mengusahakan perkebunan karet, lada, dan kakao, sedangkan kelapa sawit diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1960-an, nama Entikong jarang disebut-sebut dalam sejarah. Nama Entikong baru dikenal pada pertengahan tahun 1960-an ketika berlangsung konfrontasi Indonesia-Malaysia. Banyak sukarelawan Dwikora baik yang berasal dari daerah setempat maupun dari Jawa yang masuk ke wilayah Malaysia melalui Entikong. Bahkan saat ini di kawasan Entikong masih terdapat beberapa veteran Dwikora, salah satunya bernama Panglima Nayau. Beliau adalah panglima perang suku Dayak yang karena jasanya dalam konfrontasi dengan Malaysia dianugerahi oleh pemerintah pangkat pembantu letnan satu tituler.

Menurut penuturan Raden Nurdin, antara tahun 1970-an sampai awal 1990-an di kawasan Entikong marak aksi penyelundupan. Hal itu disebabkan belum adanya pintu

lintas batas resmi antara Indonesia dan Malaysia. Para penyelundup yang dalam bahasa setempat disebut *smokek* harus menembus hutan belantara mengikuti jalur tikus. Jalur tikus merupakan sebutan untuk jalur tidak resmi yang menghubungkan wilayah dua negara tersebut. Para *smokek* membawa hasil bumi dari wilayah Indonesia ke Malaysia dengan cara dipikul, setelah itu mereka kembali ke Indonesia dengan membawa barang kebutuhan sehari-hari. Desa Malaysia yang terdekat di seberang perbatasan adalah Entubuh, namun jika ingin memperoleh barang kebutuhan sehari-hari harus melanjutkan perjalanan ke Tebedu yang letaknya tidak jauh dari Entubuh. Pada waktu itu, perjalanan dari Entikong ke Tebedu memakan waktu tiga jam.

Pada saat itu, *smokek* menjadi salah satu mata pencaharian tidak resmi masyarakat Entikong. Memang secara umum masyarakat Entikong hidup dari kegiatan berladang, namun ketika mereka ingin menjual hasil buminya maka aksi *smokek* inilah solusinya. Bagi masyarakat sekitar, perbatasan menjual hasil bumi ke wilayah Malaysia jauh lebih menguntungkan, sebab jaraknya lebih dekat dan harganya lebih tinggi. Jika mereka ingin menjual ke kota, misalnya ke Sanggau maka akan memakan waktu lebih lama, karena saat itu belum ada moda transportasi umum Entikong-Sanggau atau Entikong-Pontianak. Jalan satu-satunya adalah menggunakan perahu dengan melalui Sungai Sekayam dan ini sangat bergantung pada kondisi debit air sungai. Selain itu, harga jual hasil bumi di Sanggau lebih rendah dibanding harga jual di Malaysia. Sebenarnya, pemerintah pernah berupaya memberantas aksi *smokek* ini dengan menempatkan anggota TNI di sepanjang jalur tikus, namun hal itu tidak efektif karena para petugas



Suasana di PPLB Entikong dari arah Malaysia menuju Indonesia terlihat sepi (atas), namun dari arah Indonesia menuju Malaysia terlihat ramai (bawah).

dapat dengan mudah disuap. Selain itu, para petugas juga memaklumi mengapa masyarakat sekitar lebih suka membeli kebutuhan sehari-hari di wilayah Malaysia.

Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong baru dibuka secara resmi pada tahun 1991. Sejak dibukanya PPLB itu, mobilitas penduduk Entikong dan sekitarnya dari dan ke Malaysia mengalami peningkatan yang pesat. Hal itu dikarenakan adanya sarana transportasi umum berupa

bus antarnegara yang melayani rute Pontianak-Kuching-Bandar Sri Begawan PP. Aktivitas lintas batas itu tentunya menghidupkan perekonomian masyarakat setempat di luar sektor pertanian dan perkebunan. Hal itu ditandai dengan bermunculannya beberapa warung makan, toko kelontong, usaha penyewaan kendaraan, *money changer*, penginapan, dan usaha ekspedisi yang melayani pengiriman barang lintas negara.

Seperti umumnya daerah



Meski harus melewati medan yang berat Satgas Pamtas Yonif Linud 305 tetap berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Patok tipe D yang berhasil ditemukan dicocokkan posisinya dengan menggunakan peta dan GPS kemudian dilaporkan ke posko dengan menggunakan radio PRC

perbatasan yang lain, di Entikong juga dapat dengan mudah ditemui produk makanan dan minuman dari Malaysia. Hal itu dikarenakan pemerintah Malaysia memberikan kuota RM 600/bulan untuk para pemilik pas lintas batas agar dapat berbelanja di wilayahnya. Tempat berbelanja favorit bagi masyarakat Entikong adalah supermarket Sin Guan Tai yang terletak di Tebedu. Sedangkan bagi para pengusaha diberlakukan izin

impor-ekspor melalui pemeriksaan Bea Cukai.

Posisi Entikong sebagai beranda depan Indonesia mengharuskan pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti puskesmas, sekolahan, pasar, kantor-kantor pemerintah, rumah susun sewa, dan sebagainya. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan desa-desa di wilayah Malaysia kondisi Entikong

masih jauh tertinggal. Kemajuan di Kecamatan Entikong hanya berpusat di desa Entikong, sedangkan desa-desa lain di sepanjang perbatasan belum merasakan kemajuan. Bahkan dua dusun di bawah desa Entikong masih belum menikmati listrik, yaitu dusun Merau dan Serangkang. Pihak pemerintah desa sudah mengajukan permohonan kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan disertai rekomendasi dari Bupati Sanggau, namun belum memperoleh tanggapan. Selain listrik, infrastruktur lain yang dibutuhkan masyarakat perbatasan adalah jalan dan jembatan.

Selama berada di Entikong, kami mewawancarai H.R. Thalib Hussein selaku tokoh masyarakat setempat dan Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Perbatasan Indonesia (AP3I). Ketokohan pria kelahiran Sanggau 5 Maret 1949 ini, tidak saja diakui oleh masyarakat setempat,

namun juga oleh pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dari berbagai penghargaan yang diberikan kepadanya, bahkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Entikong pada tahun 2005 menyempatkan diri berdialog secara khusus dengannya. Ketika pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), H.R. Thalib pula yang dijadikan sebagai narasumber utama untuk kawasan perbatasan Kalimantan Barat.

Salah satu peran penting yang beliau mainkan adalah menjaga keamanan Entikong dan sekitarnya saat terjadi konflik antaretnis di Kalimantan Barat tahun 1997. Padahal pada saat itu beliau menerima mangkuk merah dari tokoh-tokoh adat Dayak untuk melibatkan diri dalam konflik tersebut. Namun secara bijak beliau dapat menolak ajakan itu dan mampu mencegah agar konflik tersebut tidak menjalar ke kawasan Entikong. Bahkan dengan kemampuannya berdiplomasi, beliau berhasil mengungsikan 117 Kepala Keluarga etnis Madura ke barak militer Malaysia di seberang perbatasan. Agar kerusuhan antaretnis tidak terjadi lagi di Kabupaten Sanggau maka H.R. Thalib memprakarsai berdirinya Dewan Adat Bersatu di mana beliau menjadi ketuanya. Melalui dewan tersebut, beliau berharap segala permasalahan antaretnis dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah.

Perlu diketahui, di Entikong terdapat berbagai macam etnis seperti Melayu, Minang, Batak, Jawa, Madura, Flores, dan tentu saja Dayak sebagai etnis mayoritas. Kesadaran untuk menjaga keharmonisan itu juga diutarakan oleh Jordamus Pinjamin selaku Ketua Dewan Adat Masyarakat Dayak Perbatasan. Menurutnya masyarakat Dayak yang sederhana tidak pernah merasa tersisih oleh etnis

pendatang, bahkan mereka bersedia belajar kepada para pendatang agar dapat hidup lebih maju.

Mengingat posisi strategis Entikong maka pemerintah melalui BNPP berencana untuk membangun *Border Development Center* (BDC) di Entikong. Dalam BDC itu akan dibangun pelabuhan darat (*dryport*) yang akan menampung barang-barang impor dari Malaysia. Keberadaan pelabuhan darat tersebut untuk mengimbangi keberadaan fasilitas serupa milik Malaysia di Tebedu yang bernama Bandar Mutiara. Melalui pelabuhan darat tersebut, barang yang masuk ke Indonesia akan dibongkar di Entikong dan selanjutnya didistribusikan dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan ekspedisi Indonesia ke tempat lain. Dengan demikian para pengusaha ekspedisi akan dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Selain itu, untuk menghidupkan perekonomian Entikong, pihak AP3I juga berupaya menarik investor dari dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya. Pihak pemerintah Kabupaten Sanggau sendiri mendukung penuh upaya itu dengan menggratiskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi para investor.

Hal lain yang menjadi sorotan di kawasan perbatasan adalah masalah nasionalisme dan kedaulatan. Mengenai masalah nasionalisme, mayoritas masyarakat perbatasan Entikong masih memilih menjadi Warga Negara Indonesia. Sejauh ini belum ditemukan upaya sistematis dari pihak Malaysia untuk mengikis rasa nasionalisme masyarakat perbatasan. Hal itu disampaikan oleh Raden Nurdin selaku Ketua Front Pembela Perbatasan Entikong.

Guna mengetahui kondisi keamanan di daerah perbatasan Entikong, kami melakukan kunjungan ke pos komando Satuan Tugas

Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif Linud 305/Kostrad. Dalam kunjungan tersebut kami diterima oleh Letda Inf. Agus Tri Joko selaku perwira seksi teritorial Satgas Pamtas. Beliau menjelaskan bahwa batalyonnya yang berkekuatan 650 orang disebar ke dalam 33 pos perbatasan dengan pos komando di Entikong. Mereka bertanggung jawab mengamankan daerah perbatasan Kalimantan Barat sepanjang 966 km yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, dan Bengkayang. Secara rutin mereka melakukan patroli perbatasan dengan cara estafet antarpos untuk mengecek posisi 5.774 patok di wilayah tanggung jawabnya.

Terdapat empat jenis patok yang terdapat di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Pertama, patok tipe A berbentuk tugu setinggi 1,3 m dipasang setiap 300 km. Kedua, patok tipe B berbentuk tugu setinggi 45 cm dipasang setiap 50 km. Ketiga, patok tipe C memiliki tinggi 30 cm dipasang setiap 5 km. Keempat, patok tipe D memiliki tinggi 15 cm dan dipasang pada jarak 100-200 m tergantung kondisi medan. Agar memperoleh gambaran mengenai kondisi patok perbatasan, kami diberi kesempatan untuk ikut mengecek patok tipe D yang terdapat di sebuah bukit. Patok tipe D inilah yang sering bergeser atau hilang, baik karena faktor alam maupun tangan-tangan jahil pengusaha perkebunan Malaysia.

Mudah-mudahan dalam waktu mendatang beranda depan Indonesia tersebut semakin maju dan memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah.

Achmad Dedi Faozi :

BELAJAR ‘KEGAGALAN’ DARI NEGARA MATAHARI TERBIT

Sebagai negara yang berada di *ring of fire* (cincin api), Indonesia sangat rentan terhadap bencana gempa bumi, gelombang tsunami, ataupun letusan gunung berapi. Sama halnya dengan negara Jepang yang merupakan salah satu negara di Asia yang berada di wilayah rawan bencana, yang juga termasuk dalam deretan negara maju di dunia. Kemajuannya yang merata dalam berbagai bidang, membuat negara tersebut selalu diperhitungkan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia.

Dalam sejarahnya, Jepang sering kali mengalami kegagalan salah satunya pada saat perang Dunia kedua. Saat itu Jepang mengalami kehancuran mulai dari pemerintahan sampai perokonomian rakyatnya. Kehancuran dan kekalahan Jepang dari pasukan sekutu yang ketika itu, Amerika Serikat berhasil meluluhlantakan Jepang dengan dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah peristiwa tersebut, kebangkitan Jepang ditunjukkan dengan keberhasilan yang luar biasa. Melalui keberhasilan tersebut, tidaklah heran banyak mata dunia sekarang tertuju kepada Jepang, karena Jepang adalah salah satu

“Kita tidak hanya belajar dari kesuksesan. Akan tetapi Kita bisa belajar dari kegagalan”

negara di dunia yang banyak berperan dalam perbaikan dan perubahan ekonomi dunia saat ini. Kejadian terbaru, Jepang kembali belajar untuk bangkit dari kegagalan dari kejadian bencana alam tsunami. Dapat dikatakan juga, bahwa Jepang adalah salah satu negara Asia di dunia yang memiliki jiwa dan mental kuat untuk bisa keluar dari keterpurukannya. Hal tersebut sudah terbukti pada sejarah negaranya sendiri. Kehancuran atas bencana alam gempa dan tsunami Jepang yang tidak sedikit menelan korban jiwa dan harta justru lebih membangkitkan semangat jiwa-jiwa masyarakat Jepang untuk keluar dari kesulitan. Lantas apa yang menyebabkan Jepang dapat bangkit kembali dan kemudian menjadi negara paling sukses pada saat ini? Salah satu cara Jepang meraih kesuksesannya yaitu dengan cara belajar dari kegagalan.

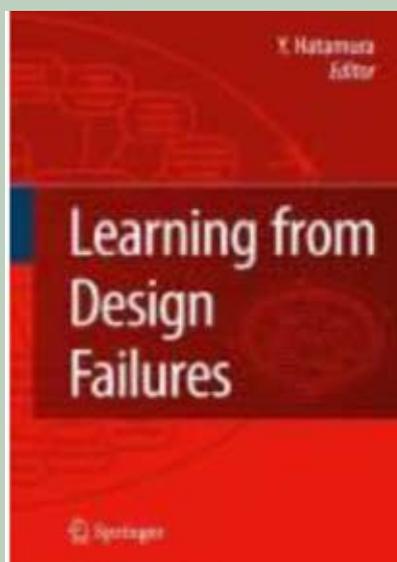
Jepang mengembangkan ilmu tentang kegagalan atau yang sering disebut dengan *Shippaigaku*. Melalui prinsip ini, Jepang mampu menghadapi segala permasalahan dengan optimis. Setiap kegagalan yang diperoleh negara tersebut selalu disikapi dengan rasa positif serta selalu dijadikan pelajaran berharga untuk meraih kesuksesan. Melalui prinsip *Shippaigaku*, Jepang mampu memformulasikan kebijakan terkait dengan bencana dalam hal ini gempa dan tsunami yang terjadi tahun 2011 dengan sangat baik. Dengan demikian, apabila terjadi gempa lagi masyarakat Jepang sudah siap menghadapinya. Tidak ada salahnya jika kita belajar dari semangat *Shippaigaku* Jepang khususnya dalam hal penanganan bencana nasional.

Istilah *Shippaigaku* pertama kali diperkenalkan oleh Takashi Tachibana, seorang kolumnis Jepang yang mengomentari studi yang dilakukan oleh Yotaro Hatamura, seorang profesor teknik mesin di The University of Tokyo. *Shippai* berarti gagal dan *gaku* berarti ilmu. Dengan kata lain *shippaigaku* berarti ilmu yang mempelajari tentang kegagalan. Kasus kecelakaan atau kegagalan beserta sebabnya dirangkum secara sistematis

yang ditulis oleh Prof Yotaro Hatamura dalam sebuah buku yang berjudul “*Learning from Design Failures*”. Buku itu mendapat sambutan yang positif dari kalangan internasional. Sejak saat itu berkembanglah ilmu baru bernama *Shippaigaku* atau ilmu tentang kegagalan. Konsepnya diterima banyak kalangan sehingga didirikanlah Asosiasi Ilmu tentang Kegagalan (ASF, *Association for the Study of Failure*). Awalnya ilmu tersebut dikhususkan untuk teknik mesin, *shippaigaku* diperluas wilayahnya ke bidang teknik lainnya bahkan masuk ke bidang manajemen karena beberapa kecelakaan/kegagalan disebabkan kesalahan di pihak manajemen. (Fuziansyah Bachtiar, 2009, Ilmu tentang Kegagalan – Sebuah Pengantar dan Yotaro Hatamura “*Learning from Design Failures*”, 2009)

Wilayah Geografis Jepang yang berada pada empat lempeng tektonik sekaligus. Lempeng Okhots (Amerika Utara), Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Laut Filipina sehingga Jepang memiliki potensi gempa yang sangat tinggi. Setiap kali terjadi pergeseran tektonik pada lempeng manapun gempa akan terjadi di Jepang. Tidak hanya gempa, tsunami juga mengancam negeri tersebut. Namun demikian, Jepang tetap optimis menghadapinya. Bahkan sistem peringatan bahaya gempa yang dimiliki Jepang merupakan yang terbaik di dunia. Sebagai negara yang sangat sering dilanda gempa dan tsunami, Jepang memberikan perhatian besar dalam penelitian berbagai fenomena kegempaan sejak tahun 1965.

Kemampuan Jepang dalam penanggulangan bencana tidak hanya didukung oleh sarana prasarana yang memadai tetapi juga didukung oleh pemerintah dan seluruh warganya. Kesadaran antisipasi gempa maupun



Buku “*Learning from Design Failures*” ditulis oleh Prof. Yotaro Hatamura

tsunami dibangun di masyarakat. Bangunan-bangunan dirancang tahan gempa. Dengan kata lain, semua komponen terintegrasi dalam hal penanganan bencana sebelum maupun setelah bencana membentuk sistem yang sangat baik. Kesadaran bahwa Jepang selalu diguncang gempa membuat pemerintahnya selalu memberikan pelatihan rutin bagi warga. Wargapun menyambutnya dengan rajin mengikuti pelatihan tersebut. Manajemen bencana diajarkan sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Prosedur tetap manajemen bencana disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan kesiapan yang matang, ketika bencana datang tiba-tiba, masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan, kapan menyelamatkan diri, harus pergi kemana, di mana tempat evakuasi, dan bagaimana bertahan hidup.

Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tanggal 11 Maret 2011, gempa dan tsunami mengguncang Negeri Matahari Terbit tersebut. Gempa berkekuatan 9 skala *richter* ini memicu tsunami setinggi 4-10 meter. Meskipun, gempa kali ini tercatat

sebagai gempa bumi paling dahsyat dalam 140 tahun terakhir di Jepang, korban jiwa dari bencana tersebut justru paling banyak disebabkan oleh sapuan gelombang tsunami, bukan karena gempa yang terjadi. Hingga 10 hari setelah bencana, korban meninggal atau dilaporkan hilang tercatat 21.459 orang. Jumlah itu tergolong sedikit jika dibandingkan dengan kekuatan gempa dan tsunami yang menimpa Jepang.

Di Indonesia sendiri, merujuk data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 27 Mei 2006 gempa 5,9 skala *richter* juga mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya yang menelan korban jiwa 3.098 orang. Bencana paling parah tentu saja gempa bumi dan tsunami di Aceh, pada 26 Desember 2004. Tragedi tsunami akhir tahun 2004 tersebut telah meninggalkan kesedihan dan penderitaan luar biasa bagi masyarakat Provinsi Aceh dan Sumatera Utara khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sekitar 173.741 jiwa meninggal dan 116.368 orang dinyatakan hilang, sedangkan di Sumatera Utara 240 orang tewas, Tsunami Aceh mengakibatkan ribuan rumah dan bangunan rusak dan menyebabkan hampir setengah juta orang menjadi pengungsi. (Sumber BNPB: <http://bnpb.go.id> & <http://inatews.bmkg.go.id>.) Melihat angka tersebut, sepertinya akan sulit membayangkan apa yang terjadi jika gempa 9 skala *richter* beserta tsunaminya yang menimpa Jepang terjadi di wilayah Indonesia. Jika gempa tsunami Aceh dan Jepang sama-sama berkekuatan 9 skala *richter*, mengapa jumlah korbannya berbeda jauh?

Perlunya prinsip *Shippaigaku* bagi Indonesia

Indonesia termasuk negara yang rawan gempa. Berdasarkan data dari



Kondisi Aceh pascatsunami, 24 Desember 2004.
(Dok. HM. ANRI)

BNPB, sejak tahun 2000 saja tercatat 17 kali gempa mulai dari 6 hingga 9 skala *richter*. Bahkan tiga di antaranya termasuk dalam daftar gempa bumi terdahsyat di dunia sejak tahun 1900. Belum lagi daerah lainnya di Indonesia. Banyaknya gunung berapi aktif di Indonesia yang juga menjadi ancaman tersendiri. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia mengharuskan Indonesia lebih fokus lagi dalam hal penanganan bencana.

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia akhirnya membentuk BNPB. Langkah ini cukup baik melihat potensi bencana yang mengancam Indonesia. Belajar dari prinsip *Shippaigaku* Jepang, Indonesia bisa mulai melakukan “studi kegagalan” dalam manajemen bencana agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Terutama dalam hal melakukan penyuluhan yang

benar mengenai bencana dengan berbasis kearifan lokal, inovasi dalam membangun sistem peringatan dini, serta pemberian keterampilan dalam hal evakuasi dan penanganan korban setelah terjadi bencana. Koordinasi antarlembaga terkait harus diperkuat kembali sehingga terbentuklah budaya masyarakat ‘sadar bencana alam’ yang berkesinambungan.

Kegagalan dalam mengatasi bencana alam bukanlah untuk ditakuti kemudian ditutupi, melainkan untuk diakui dan disadari oleh semua pihak. Keberanian untuk mengakui kegagalan harus dijadikan dorongan positif untuk membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan bermartabat. Jepang dengan *shippaigaku*-nya menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam berbagai bidang khususnya dalam menyikapi bencana

yang sering melanda tanah air tercinta ini. Kegagalan adalah keniscayaan dari proses pembelajaran, karena dari sekian banyak kegagalan, semua itu haruslah dipelajari agar kegagalan yang sama tidak terulang kembali. Pengalaman adalah guru yang terbaik, seperti kita menyikapi kegagalan berdasarkan pengalaman terdahulu yang akan menentukan apakah akan mengantarkan kita pada kesuksesan ataukah menjadi akhir perjalanan karena berputus asa.



TIM TASK FORCE : GARDA DEPAN ANRI DALAM MENYELAMATKAN ARSIP DARI BENCANA

Sebagai lembaga kearsipan nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkewajiban melaksanakan kegiatan kearsipan di tingkat nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI berkewajiban melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana. Berangkat dari kewajiban ini, ANRI membentuk tim penyelamatan dan perlindungan arsip yang dikenal sebagai Tim Task Force (Gugus Tugas).

Lahirnya Tim Task Force ANRI

Latar belakang pembentukan tim yang diketuai oleh Agus Santoso (Kepala Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Konvensional) ini tidak lepas dari keberadaan Indonesia sebagai negara rawan bencana. Kiprah ANRI dalam penanggulangan bencana terhadap arsip di Indonesia terlihat secara signifikan pada penyelamatan arsip pertanahan akibat bencana tsunami yang melanda wilayah provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2004. "Saat itu, ANRI berhasil melakukan penyelamatan buku dan sertifikat tanah yang rusak akibat terendam air dan lumpur karena

tsunami," ujar Agus. Bahkan, sebagian buku dan sertifikat tanah tersebut harus diterbangkan ke Jakarta agar dapat ditangani secara maksimal di kantor pusat ANRI, Jl. Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan.

Usaha penyelamatan arsip akibat bencana tsunami Aceh yang dilakukan ANRI mendapat dukungan dari berbagai pihak di luar negeri. "Salah satu negara yang memberikan respon bantuan yang tercepat adalah Jepang," tegas Agus. Negara yang memiliki rasa senasib dengan Indonesia sebagai negeri yang rawan bencana ini memberikan bantuan *Vacuum Freeze Dry Chamber* yang dapat memisahkan



Ketua Tim Task Force ANRI, Agus Santoso

kertas dengan lumpur dan air yang terdapat pada arsip. Dengan adanya alat dan infrastruktur yang kuat ini, ANRI dapat memperbaiki arsip yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, terutama banjir dan tsunami.

PROFIL

Pascapenanganan kerusakan arsip akibat tsunami Aceh, kiprah ANRI dalam penanggulangan bencana terhadap arsip tidak berhenti begitu saja. Menurut Agus Santoso, ANRI terus menjalankan program penyelamatan dan perlindungan arsip terhadap bencana di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2006, ANRI berperan aktif dalam penyelamatan arsip yang terkena dampak bencana alam akibat gempa Yogyakarta. Ketika itu, ANRI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan evakuasi arsip yang tertimbun reruntuhan bangunan di berbagai kantor pemerintah Provinsi DIY. ANRI juga secara aktif terlibat dalam penyelamatan arsip bencana banjir di Bojonegoro pada 2007. Tahun 2009, ANRI secara aktif melakukan penyelamatan arsip yang mengalami kerusakan akibat bencana jebolnya tanggul Situ Gintung. “Pada saat itu, ANRI melakukan perbaikan arsip Universitas Muhammadiyah Jakarta yang terendam air dan lumpur,” kata Agus. Selain itu, ANRI juga melakukan perbaikan dan penyelamatan arsip pribadi milik Seto Mulyadi (Kak Seto) terkena dampak bencana jebolnya tanggul Situ Gintung.

Pada tahun 2013, Jakarta kembali dihantam bencana banjir yang terjadi akibat siklus lima tahunan. Banjir ini melumpuhkan ekonomi di sebagian besar wilayah Jakarta. Menurut catatan, kerugian yang diakibatkan bencana banjir ini ditaksir mencapai 20 triliun rupiah. Banjir ini juga membuat kegiatan pemerintahan di tingkat pusat sempat terhenti beberapa hari akibat akses jalan menuju kantor yang terendam air. Tidak hanya itu, air juga merendam sebagian arsip Pemerintah Pusat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sebagai respon tanggap darurat bencana banjir yang telah ditetapkan oleh Gubernur



Penanganan arsip yang terkena banjir di daerah Jawa Timur (20080101/Dok. HM. ANRI)



Vacuum Freeze Dry Chamber

DKI Jakarta Joko Widodo, ANRI membentuk Tim Penanggulangan Bencana Banjir terhadap Arsip di DKI Jakarta dan Sekitarnya sejak tanggal 17 Januari 2013. Tim ini dikenal dengan nama *Tim Task Force ANRI*.

Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Tim Task Force ANRI dibentuk di bawah arahan Pejabat Eselon I ANRI dan berada dibawah tanggung jawab Direktur Preservasi dan Direktur

Kearsipan Pusat. Susunan *Tim Task Force ANRI* melibatkan pejabat struktural, arsiparis, dan fungsional umum dari berbagai unit kerja di lingkungan ANRI seperti Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, SubDirektorat Restorasi Arsip, SubDirektorat Kearsipan Pusat II, SubDirektorat Akuisisi Arsip Lembaga Negara dan Badan Pemerintah, serta Bagian Hubungan Masyarakat (Humas).



Mobil Rescue Penanggulangan dan Penyelamatan Arsip yang terkena semburan debu gunung merapi (20101101/Dok. HM. ANRI)

Tidak hanya sumber daya manusia yang dapat diandalkan, Tim *Task Force* ANRI juga didukung dengan infrastruktur yang lengkap. Tim ini memiliki mobil *rescue* arsip yang dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau kendaraan beroda empat pada umumnya. Selain itu mobil ini dapat digunakan untuk mengangkut arsip yang akan diselamatkan dari bencana. Tim *Task Force* ANRI juga memiliki mesin *Vacuum Freeze Dry Chamber* yang dapat digunakan untuk memisahkan air dan lumpur dengan arsip. Tim *Task Force* ANRI juga memiliki perlengkapan restorasi arsip baik untuk yang berbentuk kertas (konvensional) ataupun foto, audiovisual, dan rekaman suara (media baru). Sarana dan prasarana ini selalu mendukung setiap langkah Tim *Task Force* ANRI dalam rangka penyelamatan arsip akibat bencana.

Pelaksanaan yang Sistematis dan Terencana

Setiap kegiatan Tim *Task Force* ANRI dalam rangka penyelamatan arsip akibat bencana selalu dilakukan secara sistematis dengan perencanaan yang matang. Dalam keadaan tanggap darurat, ANRI

selalu melakukan rapat koordinasi internal ANRI dan eksternal dengan instansi-instansi yang terkena dampak bencana. Langkah ini diikuti dengan survei yang dilakukan Tim *Task Force* ANRI ke lokasi yang terkena dampak bencana. Dari survei ini, Tim *Task Force* dapat melakukan identifikasi jumlah dan tingkat kerusakan arsip akibat bencana. Pada kasus bencana banjir Jakarta, Tim *Task Force* ANRI melakukan survei ke sembilan instansi yang terkena dampak bencana banjir.

Langkah Tim *Task Force* ANRI selanjutnya adalah evakuasi yang merupakan proses pemindahan arsip dari daerah bencana ke daerah yang lebih aman, dengan memperhatikan kondisi lapangan dan mengupayakan keselamatan pekerja serta arsip. Perbaikan arsip yang rusak akibat bencana bisa di ANRI apabila tingkat kerusakan dan volume arsip sangat tinggi, serta kondisi daerah bencana yang tidak memungkinkan. Setelah itu Tim *Task Force* ANRI melakukan rehabilitasi yang merupakan kegiatan perbaikan/restorasi dan pemulihan arsip yang terkena dampak bencana alam dengan tujuan untuk menyelamatkan fisik dan informasi

arsip sehingga arsip yang telah diperbaiki dapat didayagunakan kembali oleh pemilik arsip.

Koordinasi Antarlembaga Pemerintah yang Kuat dan Berkelanjutan

Dalam melakukan penyelamatan arsip akibat bencana, ANRI senantiasa melakukan koordinasi yang kuat dengan lembaga dan organisasi pemerintah terkait. Untuk bencana yang berskala nasional, ANRI selalu melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diamanatkan Pasal 34 Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Selain itu ANRI tidak jarang bekerja sama dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, terutama lembaga kearsipan daerah. Sebagai contoh, penyelamatan arsip akibat bencana banjir Jakarta tidak lepas dari koordinasi yang kuat antara ANRI, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai kementerian dan lembaga. Jaringan ini terbentuk dari fungsi pembinaan kearsipan yang dimiliki ANRI baik di tingkat pusat dan daerah melalui Direktorat Kearsipan Pusat dan Direktorat Kearsipan Daerah.

Pemerintah dan Masyarakat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar agar Tim *Task Force* ANRI dapat selalu memberikan layanan yang terbaik dalam upaya penyelamatan arsip dari bencana. Untuk itu, perlu adanya dukungan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak baik di lingkungan internal ANRI, pemerintah, dan masyarakat agar Tim *Task Force* ANRI terus dapat menyelamatkan arsip dari bencana di Indonesia. (AGP)

Lufi Herawan:

AUGMENTED REALITY (AR) DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Coba kita bayangkan apabila sebuah bentuk tiga dimensi (3D) tiba-tiba muncul saat kita arahkan *smartphone* yang kita miliki ke arah arsip kartografi, seolah olah merepresentasikan sebuah bentuk 3D sesuai dengan konstruksi yang terdapat dalam arsip tersebut. Atau tiba-tiba muncul semua daftar berkas ketika kita arahkan *smartphone* pada sebuah *filling cabinet* dalam unit kerja kita, lengkap dengan daftar isi berkasnya. Begitu pula dengan arsip inaktif di *Record Centre*, serta arsip statis yang tersimpan di depot arsip pada lembaga kearsipan. Tentunya hal tersebut juga akan sangat membantu kita dalam sarana temu balik arsip, serta akan mampu menyajikan informasi lebih baik dan detail karena disajikan dalam bentuk 3D.

Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, tentunya hal di atas sangat mungkin terjadi dan dapat diterapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Teknologi yang melatarbelakangi hal tersebut dapat kita kenal dengan nama *Augmented Reality* (realitas tertambah) atau biasa disingkat dengan AR. AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya



Gambar ilustrasi penggunaan Augmented Reality (AR)

tersebut dalam waktu nyata. Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh indera para pengguna. Hal ini membuat AR sesuai digunakan sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi pengguna dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata.

AR dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Dengan demikian, para pengguna akan mampu mendapatkan informasi yang lebih

lengkap serta mampu berinteraksi dengan baik. AR dapat juga digunakan dalam bidang kesehatan, militer, industri manufaktur. Selain itu realitas tertambah juga telah diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan orang banyak, seperti pada *Personal Computer* (PC), *Notebook*, *Tablet*, *Smartphone* dan lain-lain.

Pengertian *Augmented Reality*

Ronald T. Azuma (1997) mendefinisikan *augmented reality* sebagai penggabungan benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam



Penggunaan AR dalam bidang kesehatan

waktu nyata, dan terdapat integrasi antarbenda dalam tiga dimensi, yaitu benda maya terintegrasi dalam dunia nyata.

Penggabungan benda nyata dan maya dimungkinkan dengan teknologi tampilan yang sesuai, interaktivitas dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input tertentu, dan integrasi yang baik memerlukan penjejukan yang efektif.

Selain menambahkan benda maya dalam lingkungan nyata, realitas ditambah juga berpotensi menghilangkan benda-benda yang sudah ada. Menambah sebuah lapisan gambar maya dimungkinkan untuk menghilangkan atau menyembunyikan lingkungan nyata dari pandangan pengguna. Misalnya, untuk menyembunyikan sebuah meja dalam lingkungan nyata, perlu digambarkan lapisan representasi tembok dan lantai kosong yang diletakkan di atas gambar meja nyata, sehingga menutupi meja nyata dari pandangan pengguna.

Teknologi AR tersebut dapat juga digunakan dalam beberapa bidang kehidupan, sehingga mampu mempermudah tugas kita serta



Penggunaan AR dalam bidang manufaktur

mempermudah pencapaian tujuan kerja kita.

Augmented Reality dalam Bidang Kesehatan

Bidang ini merupakan salah satu bidang yang paling penting bagi AR. Contoh penggunaannya adalah pada pemeriksaan sebelum operasi, seperti *Computer Tomography (CT) Scan* atau *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* yang memberikan gambaran kepada ahli bedah mengenai anatomi internal pasien. Dari gambar-gambar ini kemudian pembedahan direncanakan. AR dapat diaplikasikan sehingga tim bedah dapat melihat data *CT Scan* atau MRI pada pasien saat pembedahan berlangsung. Penggunaan lain adalah untuk pencitraan ultrasonik, di mana teknisi ultrasonik dapat mengamati

pencitraan fetus yang terletak di abdomen wanita yang hamil.

Augmented Reality dalam Manufaktur dan Reparasi

Bidang lain di mana AR dapat diaplikasikan adalah pada pemasangan, pemeliharaan, dan reparasi mesin-mesin berstruktur kompleks, seperti mesin mobil. Instruksi-instruksi yang dibutuhkan dapat dimengerti dengan lebih mudah dengan AR, yaitu dengan menampilkan gambar-gambar tiga dimensi di atas peralatan yang nyata. Gambar-gambar ini menampilkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya dan cara melakukannya. Selain itu, gambar-gambar tiga dimensi ini juga dapat dianimasikan sehingga instruksi yang diberikan menjadi semakin jelas.

Augmented Reality dalam Bidang Hiburan

Bentuk sederhana dari AR telah dipergunakan dalam bidang hiburan dan berita untuk waktu yang cukup lama. Contohnya adalah pada acara laporan cuaca dalam siaran televisi di mana wartawan ditampilkan berdiri di depan peta cuaca yang berubah. Dalam studio, wartawan tersebut sebenarnya berdiri di depan layar biru atau hijau. Pencitraan yang asli digabungkan dengan peta buatan komputer menggunakan teknik yang bernama *chroma-keying*.

Augmented Reality dalam Bidang Pelatihan Militer

Kalangan militer telah bertahun-tahun menggunakan tampilan dalam kokpit yang menampilkan informasi kepada pilot pada kaca pelindung kokpit atau kaca depan helm penerbangan mereka. Ini merupakan sebuah bentuk tampilan AR. SIMNET, sebuah sistem permainan simulasi perang, juga menggunakan teknologi AR. Dengan melengkapi anggota militer dengan

VARIA

tampilan kaca depan helm, aktivitas unit lain yang berpartisipasi dapat ditampilkan.

Augmented Reality dalam Bidang Navigasi Telepon Genggam

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, telah banyak integrasi AR yang dimanfaatkan pada telepon genggam. AR adalah sebuah presentasi dasar dari aplikasi-aplikasi navigasi. Dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) maka aplikasi pada telepon genggam dapat mengetahui keberadaan penggunanya pada setiap waktu. Dengan digabungkannya AR dengan GPS akan mampu menampilkan jalur serta menyuarakan kepada pengguna untuk mengarahkan kendaraannya sesuai dengan jalur tersebut.

Selain kegunaan yang telah disebutkan di atas tentunya masih banyak kegunaan lainnya baik yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun kegunaan baru yang masih dalam tahap penelitian serta belum diterapkan.

Pemanfaatan AR dalam Penyelenggaraan Kearsipan

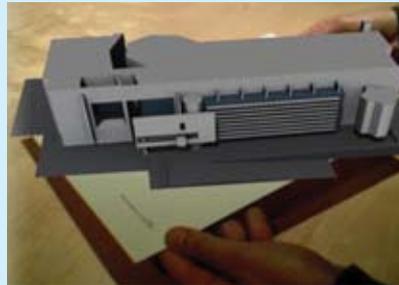
Teknologi AR dapat juga dimanfaatkan dalam dunia kearsipan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mempunyai banyak ruang lingkup. Teknologi AR dalam penyelenggaraan kearsipan di antaranya dapat diterapkan pada arsip kartografi, *retrieval* (temu balik), notifikasi penyusutan arsip dan sumber daya kearsipan.

Arsip Kartografi

Kartografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai gambar peta atau dapat juga diartikan sebagai seni atau keahlian membuat peta. Walaupun



Penggunaan AR dalam navigasi



Penggunaan AR pada arsip arsitektur

dalam dunia kearsipan arsitektur juga merupakan bagian dari arsip kartografi, dalam KBBI arsitektur sendiri dapat diartikan sebagai seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Kartografi dapat juga berarti metode dan gaya rancangan suatu konstruksi.

Ketika kita berbicara mengenai arsip kartografi tentunya ada sebuah usaha untuk menuangkan bentuk benda ke dalam kertas sebagai media arsipnya. Tetapi tentu saja hal tersebut akan mengalami kesulitan dikarenakan bentuk benda 3 dimensi harus dituangkan dalam bentuk 2 dimensi (kertas) sebagai arsip.

Teknologi AR dapat diterapkan pada arsip jenis ini dimana bentuk 3 dimensi dari benda yang tertuang



penggunaan AR pada arsip peta

dalam arsip tersebut dapat digambarkan secara utuh dan sesuai dengan aslinya. Tentunya hal tersebut dapat memberikan informasi yang lebih utuh.

Retrieval (Temu Balik)

Retrieval dalam dunia kearsipan sangat memegang peranan sangat penting, karena sesungguhnya berhasilnya pengelolaan arsip dapat dilihat berdasarkan mudah dan cepatnya melakukan temu balik arsip. Oleh karena itu AR dapat kita gunakan sebagai sarana mempercepat temu balik arsip, tentunya dengan catatan bahwa pengelolaan arsip telah dilakukan dengan baik.

Cara kerja temu balik arsip menggunakan AR adalah dengan memanfaatkan daftar arsip yang sudah diinput ke dalam basis data arsip yang akan ditampilkan secara maya ke dalam dunia nyata. Sebagai contoh apabila kita akan mencari arsip tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan maka kita tinggal memasukkan nama maupun jenis arsip yang dicari ke dalam *form* pencarian. Maka secara cepat arsip akan muncul pada boks arsip yang di dalamnya terdapat arsip yang dicari, yang akan ditampilkan secara maya baik melalui layar *smartphone* yang kita miliki, atau pun alat lain yang digunakan.

Notifikasi Penyusutan Arsip

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusutan arsip dilakukan

berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang telah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dimana penyusutan Arsip sendiri meliputi, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis.

Teknologi AR dapat pula diterapkan sebagai notifikasi terhadap penyusutan arsip. Di mana pengguna akan diberi tahu bahwa arsip tersebut sudah harus dipindahkan, dimusnahkan atau bahkan diserahkan. Notifikasi tersebut dapat muncul dengan cepat pada layar pengguna sehingga pengguna dapat langsung melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Secara teknis notifikasi penyusutan tersebut akan mengambil data dari basis data arsip yang sudah dilengkapi dengan JRA yang melekat pada tiap-tiap arsip. Apabila arsip tersebut sudah melewati jadwal retensinya maka secara otomatis notifikasi akan ditampilkan baik berupa arsip yang sudah harus dipindahkan, dimusnahkan maupun diserahkan. Notifikasi tersebut akan ditampilkan secara maya pada layar *smartphone* yang kita miliki, atau pun alat lain yang digunakan.

Dari gambar di atas, dapat dianalogikan untuk arsip yang telah melewati retensi dan masuk ke dalam usul musnah ditunjukkan dengan notifikasi warna kuning, sedangkan untuk arsip yang telah melewati retensi dan masuk kedalam usul serah ditunjukkan dengan notifikasi warna merah.

Sumber Daya Kearsipan

Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan terdapat peraturan mengenai Sumber



Penggunaan AR pada Notifikasi Penyusutan Arsip (usul musnah dan usul serah) di *Record Centre*



Penggunaan AR pada Temu Balik Arsip di *Record Centre*



Penggunaan AR untuk menunjukkan recapitulasi jumlah sumber daya manusia kearsipan di seluruh Indonesia

daya kearsipan yang terdapat beberapa bagian. Di antaranya organisasi kearsipan dan sumber daya manusia.

Teknologi AR kiranya juga dapat diimplementasikan dalam rangka recapitulasi jumlah organisasi kearsipan, dalam hal ini Unit Kearsipan maupun Lembaga Kearsipan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota maupun perguruan tinggi. Selain itu dapat juga diterapkan untuk recapitulasi jumlah sumber daya manusia (pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Apabila pengguna mengarahkan *device (smartphone dan lain-lain)* ke dalam peta Indonesia maka akan ditampilkan statistik organisasi

kearsipan serta sumber daya manusia kearsipan pada setiap daerah yang kita inginkan yang berada di seluruh Indonesia. Informasi yang ditampilkan pun dapat berupa diagram yang secara interaktif dapat memberikan informasi lain yang dibutuhkan oleh pengguna.

Demikianlah beberapa contoh pemanfaatan AR dalam penyelenggaraan kearsipan dan tentunya masih banyak ruang lingkup dalam penyelenggaraan kearsipan yang masih dapat kita optimalkan dengan menggunakan teknologi AR. Akhirnya, perkembangan teknologi yang demikian pesat harus mampu kita manfaatkan untuk membantu serta mempermudah kerja kita. Tak menutup kemungkinan untuk diterapkan pula dalam dunia kearsipan.

Kris Hapsari :

TITIK BATAS KERINDUAN

Kampung batik Laweyan semakin ramai oleh pengunjung dan wisatawan. Di gang-gang sempit, orang keluar masuk rumah-rumah yang sekaligus berfungsi sebagai pabrik dan toko untuk berbelanja batik. Kami masuki kampung dengan menyusuri jalan di samping Langgar (Surau) Merdeka yang aku lihat masih sama bentuknya seperti ketika aku masih kecil. Makam Ndowo yang persis ada di sebelahnya juga masih dipagari dengan tembok putih, seolah menyimpan misteri tentang kisah keberadaan puluhan tombak panjang yang dikubur oleh para pemberontak Mataram untuk melawan pemerintah kolonial pada abad ke-19. Dari perempatan jalan, kulihat rumah keluarga Haji Sahmanhudi dan di ujungnya tampak jembatan kecil menuju mesjid Laweyan yang berdiri berdampingan dengan makam

Pakubuwono II, Kyai Ageng Henis dan Makam Belukan. Sedianya kami hendak langsung berjalan lurus ke makam bapak di kampung Banaran. Namun niatan itu kami urungkan ketika di jalan Sidoluhur, jalan utama kampung Laweyan penuh dengan deretan mobil yang sedang parkir. Jalan itu sekarang menjadi sangat hidup karena menjadi salah satu tujuan utama wisata di kota Solo, setelah Jokowi berhasil menjadikan kota Solo sebagai kota pariwisata.

Kubiarkan suami dan anakku berjalan jauh di depan. Aku melangkah pelan-pelan, sangat perlahan. Tibatiba aku ingin terpisah jarak dan waktu dengan mereka berdua. Aku ingin sendiri dan kembali pada sebuah masa ketika mereka berdua belum hadir dalam kehidupanku. Ku tengok

sebuah rumah yang berdampingan dengan Langgar Makmur. Itu adalah rumah kerabat jauh yang sering aku kunjungi di masa kecilku, yaitu ketika aku disuruh oleh mbah putri untuk mengantar makanan kepada penghuni rumah itu. Jalan Sidoluhur adalah jalan kenangan bagiku dan seluruh kampung Laweyan adalah tempat yang penuh arti dalam kehidupanku.

Semakin aku berjalan ke arah timur jalan Sidoluhur, aliran darahku semakin membuncah, jantungku semakin berdebar. Sepuluh langkah lagi, aku jumpai rumah keluarga almarhum bapak. Sekonyong-sekonyong aku merasa menjadi lysis kecil yang dituntun ibu dan bapak berkunjung ke rumah mbah putri dan berkumpul dengan sepupu-sepupu kecilku. Aku seolah mendapati diriku naik pohon jambu di halaman rumah dan tidur di atas atap seng yang diteduhi

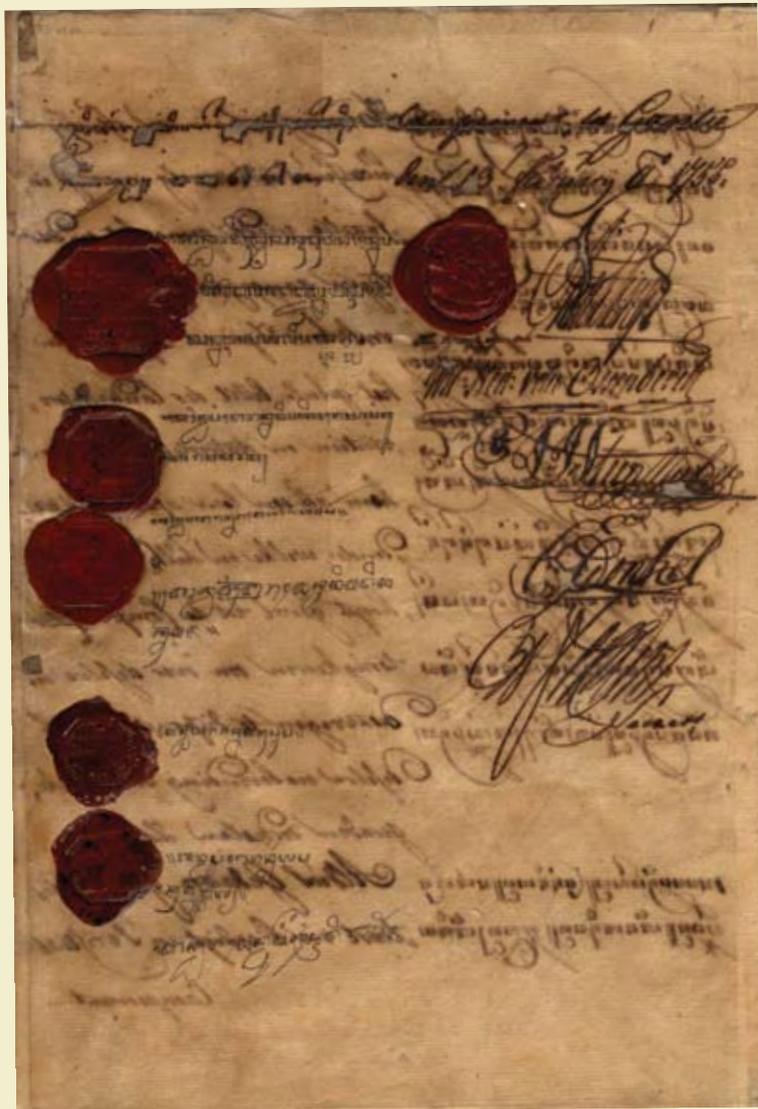


Batik, Missive Gouvernement Secretarie Geheim
19 November 1915 Nomor 42

oleh segerembul daun jambu. Ada air bening dari mataku. Kenangan itu seolah baru terjadi kemarin, tetapi aku harus menyadari sekarang bahwa kejadian itu sudah 40 tahun yang lalu. Masih ada beberapa kerabat yang tinggal di kampung ini, tetapi orang-orang yang dahulu selalu menyapa ketika aku, ibu dan bapak melewati jalan Sidoluhur sudah tidak kutemui lagi. Tidak kujumpai lagi sapaan bude Waroto, bude Mardi atau teman-teman kecilku yang lain. Kudapati wajah-wajah baru yang tidak aku kenal, anak-anak muda yang setiap kusapa dan kutanya dengan bahasa Jawa selalu menjawab dengan bahasa Indonesia. Aku seperti putus asa karena kehilangan pertautan dengan masa lalu. Rasa keterasingan sekaligus kehilangan yang teramat besar memenuhi dadaku.

Sungai Jenes terpampang di depanku. Sisa-sisa bencana banjir dua tahun silam masih membekas disepanjang sungai itu. Beberapa pohon besar yang tercerabut oleh gerusan air tampak meninggalkan tonjolan akar dimana-mana. Longsoran ditepi sungai juga belum seluruhnya diturap. Aliran sungai tersebut tampak semakin memerah, ada bau obat batik dimana-mana. Baunya mengingatkanku pada sosok-sosok tercinta yang saat ini tidak dapat lagi kulihat, apalagi kurengkuh dalam pelukan. Ada kesedihan yang mendadak menyelinap dalam hati.

Beberapa wajah mulai terbayang di kepalaku. Mbah buyut Harjowikarto, sosok wanita sangat tua, sesepuh yang sangat sabar dan bijaksana. Wanita 96 tahun ini, adalah Mbok mase sepuh Laweyan yang pada era tahun 1930-an dikenal dengan *Harjo Lojen* karena memiliki rumah loji di daerah Sondakan. Aku mulai terngungun ketika sekelebat kemudian, muncul bayangan mbah putri yang cantik dan gemuk, yang paling suka memanjakan cucu-cucunya meski harus bertengkar dengan anak-anaknya karena rasa sayang yang berlebihan kepada makhluk-



Arsip Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755, yaitu perjanjian antara Sultan Hamengkubuwono I dengan Nicolas Hartingh mengenai pembagian daerah Kerajaan Mataram menjadi 2 (dua) wilayah. Pertama, Sunan Pakubuwono III menguasai Keraton Surakarta (Solo) dan seluruh wilayah bagian Solo. Kedua, Sultan Hamengkubuwono I menguasai Keraton Yogyakarta dan seluruh wilayah bagian Yogyakarta. (Khazanah: ANRI, Solo 42)

mahluk kecil penerus generasinya. Wanita penyayang berkulit kuning langsung itu adalah wanita perkasa dalam arti yang sesungguhnya. Ia manajer bagi perusahaan batik kecil miliknya sekaligus tenaga pemasaran yang sangat tangguh. Kecintaan kepada keluarga yang sangat besar, digabung dengan jiwa dagang yang menggelora mengalahkan rasa takut dan membuatnya berani menantang maut. Di tengah larangan berdagang sandang pada periode pendudukan Jepang, ia berjalan batik dengan

cara metengan (berpura-pura hamil), dengan melilitkan puluhan lembar kain batik produksinya diperut. Ia tertangkap oleh tentara Jepang, namun selamat dari ujung bayonet karena tentara kate yang hendak menangkapnya sekonyong-konyong sakit perut. Dua wanita itu, adalah pejuang kehidupan yang tangguh. Dalam diri keduanya, terdapat darah juang yang tidak pernah berhenti mengalir, yang memompakan energi pada setiap langkah kehidupannya. Keduanya adalah Srikanthi, yang memberikan

CERITA KITA

waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengasuh anak-anaknya, sekaligus mendampingi suami menjalankan roda usaha perusahaan batik.

Tidak terbelenggu air mata ini, ketika sekelebatan wajah lelaki tua dan kurus yang sangat menyayangi muncul dalam bayangan. Dia yang mencintai anak-anaknya dengan caranya sendiri adalah laki-laki hebat yang sangat sederhana, yang kelemahannya justru menjadi gudang inspirasi bagi anak-anaknya. Tiga sosok istimewa itu, kini telah terbaring berdampingan. Mereka beristirahat dalam tidur abadinya bersama dengan para leluhur yang lain, bersama dengan saudara dan tetangga yang menjadi partner sekaligus saingan perusahaan batiknya, bersama-sama dengan Haji Sahmanhudi si pendiri Sarekat Islam di tempat yang sama, di makam Banaran yang penuh riwayat. Mereka juga tidur dengan para korban Agresi Belanda II. Mereka tidur bersama, seolah-olah dilindungi oleh makam besar Tumenggung Adipati Jayeng Rana dari Surabaya yang meninggal dalam pelarian sebagai akibat perseteruannya dengan Belanda. Ada rasa sepi dan giris dalam hati, yang tidak dapat aku jelaskan dengan cara apapun. Aku menjerit dalam diam, aku merindukan mereka. Rindu yang tidak terbatas.

Dari ujung jalan kampung Kidul Pasar yang konon bersebelahan dengan bekas rumah Adipati Unus, kupandang dari kejauhan dua kompleks pemakaman yang terpisah oleh aliran sungai Jenes. Dua makam tersebut adalah salah satu saksi bisu kebesaran kampungku, kampung Laweyan beserta seluruh sepaik terjang penghuninya. Sejatinya kampungku adalah kampung tua, yang kebesaran namanya terjalin dengan aliran peristiwa dan sejarah kerajaan Pajang serta kerajaan besar Mataram Islam. Sungai yang membatasi dua pemakaman itu, menurut cerita para sesepuh merupakan bandar pelabuhan kecil yang ramai dikunjungi para pedagang pada masa kerajaan

Pajang. Di belokan aliran sungai, makam Kyai Ageng Henis dan Paku Buwono II, dua tokoh besar dalam perjalanan kerajaan Mataram Islam seolah menjaga penghuni kampung dari keterputusan sejarah dengan nenek moyang. Gang-gang sempitnya menjadi penghubung masa kini dan masa lalu ketika saudagar dan pedagang dari berbagai daerah membelanjakan uangnya untuk membeli batik yang selanjutnya dipasarkan di daerahnya masing-masing. Di batas luar kampung terdapat jalan raya besar yang menghubungkan tiga tempat keramat, wilayah Pajang pusat kerajaan Sultan Hadiwijoyo atau Jaka Tingkir cikal bakal kerajaan Mataram Islam; kraton Kartasura yang rusak dan ditinggalkan karena Geger Pacinan; serta kraton Kasunanan pecahan kerajaan Mataram Islam yang muncul bersama-sama dengan Kasultanan Yogyakarta sebagai akibat intrik intern kerajaan yang berakhir dengan palihan nagari.

Aku menghela napas panjang. Hujan gerimis yang membawa udara dingin menambah panjang kenangan pada kampung ini. Aku bayangkan ketika pengusaha batik kaya raya bernama Sahmanhudi memimpin rapat organisasi Sarekat Islam di rumahnya di kampung Setono, dan dari berbagai gang kecil di kampung Sayangan, Lor Pasar, Kidul Pasar dan Jagalan, para pengusaha batik Laweyan berjalan menuju rumah Sahmanhudi untuk membicarakan persaingan usaha mereka dengan pengusaha Cina bernama Sie Dian Ho dari kampung Tegalmulyo. Pikiranku juga berkelana ke masa yang lebih jauh, ketika kampung kami dijadikan sebagai tempat eksekusi pasangan kekasih yang tidak mendapat restu, Raden Pabelan dan putri Sultan Hadiwijoyo yang menurut cerita dihukum gantung dengan menggunakan benang pembuat kain batik (lawe).

Aku membalikkan badan. Kupeluk Iman dan Imi, suami dan anakku, yang sedari tadi menungguku dengan sabar. Aku tuturkan kepada mereka

bagian dari masa lalu leluhurku. Aku pesankan pada keduanya bahwa darah Laweyan yang mengalir dalam tubuhku adalah darah pejuang kehidupan. Mereka mengangguk, mereka terpekur. Dengan terbata-bata Imi berucap bahwa seandainya seluruh peristiwa tersebut tersurat dalam tulisan, maka keseluruhan tempat di wilayah ini akan menjadi prasasti panjang tak berujung.

Kuajak pulang keduanya, setelah kami melantunkan doa-doa panjang dan menabur mawar di makam orang-orang tercinta. Kali ini adalah lebaran ke dua tanpa bapak yang berpulang ketika Bengawan Solo meluapkan air di seluruh tempat yang dilaluinya, dan menimbulkan bencana banjir di kota Solo. Sepeninggal bapak, aku merasakan betapa beratnya melalui hari-hari tanpa sapaan dan sentuhan seorang ayah. Ada ruang kosong yang tidak dapat terisi oleh siapapun dan oleh apapun. Ada perih karena luka hati. Bukan luka karena ketiadaan orang yang mencintai, karena aku tahu dari tempat terindah di atas surga, orang-orang tercintaku masih akan terus menyayangi dan bahagia melihatku dapat menjadi istri dan ibu yang baik bagi suami dan anakku. Namun luka ini lebih karena kehilangan waktu dan kesempatan untuk mencintai orang-orang terkasih. Mbah buyut, mbah putri, bapak, kami pamit. Besok kami harus kembali ke Jakarta, meninggalkan ibu di rumah Sondakan dan saudara-saudara lain yang penuh cinta, berjuang untuk melanjutkan hidup, mewujudkan harapan dan impian.

JAKARTA BANJIR, ANRI SELAMATKAN ARSIP DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN DKI JAKARTA



Kepala ANRI, M. Asichin (bertopi putih) memimpin langsung perlindungan dan penyelamatan arsip akibat banjir

JAKARTA, ARSIP - Banjir yang menimpa wilayah DKI Jakarta beberapa hari terakhir ini tak hanya menimbulkan korban jiwa ataupun materi. Banyak informasi yang autentik dan terpercaya yang terekam dalam arsip ikut terendam akibat banjir pada awal tahun 2013 ini. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan cepat tanggap terhadap kondisi banjir yang menimpa DKI Jakarta dengan melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip. Hal tersebut sesuai dengan amanat

pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang salah satunya menerangkan bahwa negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana alam.

Setelah pada 18 Januari 2013 melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip milik Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 25 Januari 2013 ANRI kembali melakukan penyelamatan dan perlindungan arsip milik Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan provinsi DKI Jakarta di

jalan Taman Pluit No.1, Jakarta Utara. Pelindungan dan penyelamatan arsip tersebut langsung dipimpin oleh Kepala ANRI, M. Asichin didampingi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta, Maman Achdiyat, Direktur Preservasi ANRI, Imam Gunarto dan tim preservasi arsip ANRI.

Kepala ANRI pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa ANRI dalam hal ini bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip yang terkena banjir. "Arsipnya akan kami bawa dulu ke ANRI untuk diperbaiki, setelah itu baru kami serahkan kembali ke pemprov DKI," tambahnya.

Arsip Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan provinsi DKI Jakarta yang terendam banjir ini dibawa ke kantor ANRI untuk diperbaiki dengan menggunakan mobil *rescue* milik ANRI dan mobil layanan masyarakat sadar arsip pemerintah provinsi DKI Jakarta. Arsip tersebut akan diperbaiki salah satunya dengan bantuan alat *vacuum freeze dry chamber*. (TK)

TAUFIQ KIEMAS KUNJUNGI ANRI DAN LAKSANAKAN WAWANCARA SEJARAH LISAN



Kepala ANRI, M. Asichin memberikan cinderamata reproduksi arsip “Aku adalah engkau dan engkau adalah Aku” kepada Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas

JAKARTA, ARSIP - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Taufiq Kiemas beserta Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal MPR RI mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan, pada 28 Januari 2013. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala ANRI, M. Asichin beserta pejabat eselon I dan II terkait. Dalam agendanya, Taufiq Kiemas beserta jajarannya akan mengunjungi, Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, dan melaksanakan wawancara sejarah lisan (*oral history*).

Ketua MPR RI periode 2009-2014 mengunjungi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa yang telah diresmikan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada 31 Agustus 2009. Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa merupakan ungkapan dinamika proses berbangsa dan bernegara dari masa ke masa yang ditampilkan melalui perpaduan arsip, seni, dan teknologi.

Di sela-sela kunjungannya, menantu Sang Proklamator ini menyatakan bahwa arsip sejarah perjalanan bangsa diserahkan kepada ANRI. Beliau pun memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keberadaan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa di ANRI. Menurutnya, berada dalam diorama ini seakan-akan mengingatkan kita akan perjuangan pahlawan dan pejuang bangsa. “ANRI harus mensosialisasikan diorama ini ke masyarakat luas, khususnya pelajar dan mahasiswa,” tambahnya.

Agenda kunjungan Taufiq Kiemas beserta rengrengannya ini merupakan salah satu tindak lanjut atas audiensi yang telah dilaksanakan Kepala ANRI dengan pimpinan MPR RI pada 21 Januari 2013. Sebagai salah satu politikus yang mengapresiasi akan pendokumentasian sejarah perjalanan bangsa, Taufiq Kiemas menyambut baik akan pelaksanaan wawancara sejarah lisan (*oral history*) terhadap dirinya yang dilaksanakan di ANRI. Wawancara sejarah lisan merupakan salah satu program dari ANRI dalam rangka menambah dan melengkapi serta mengisi kekosongan atau gap yang terdapat pada sumber-sumber tertulis atau khazanah arsip. (TK)

KETUA DPD RI KUNJUNGI ANRI



Ketua DPD RI, Irman Gusman (tengah) ketika melihat khazanah arsip di Ruang Baca ANRI didampingi Kepala ANRI, M. Asichin (kanan)

JAKARTA, ARSIP - Usai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 29 Januari 2013, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Asichin didampingi pejabat eselon I dan terkait di lingkungan ANRI menerima kunjungan Ketua DPD RI, Irman Gusman pada pukul 14.30 WIB. Setibanya di ANRI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI langsung melaksanakan wawancara sejarah lisan (*oral history*). Wawancara sejarah lisan dilaksanakan kepadanya berkaitan dengan jabatan yang beliau pimpin, perjalanan hidupnya dan hal



Ketua DPD RI, Irman Gusman didampingi Kepala ANRI, M. Asichin saat berada di Hall F Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa

lain yang bernilai guna kesejarahan untuk masa mendatang.

Usai melaksanakan sejarah lisan, sosok pria kelahiran Pandang Panjang

11 Februari 1962 ini mengunjungi ruang restorasi arsip dan tempat penyimpanan arsip (depot) naskah proklamasi. Setelah itu, tak lupa Kepala ANRI pun memperkenalkan Ruang Baca sebagai tempat layanan arsip statis dan telah meraih sertifikat ISO 9001:2008 dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa ini dibangun dengan gagasan untuk mengangkat peranan arsip sebagai bagian penting guna memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta kecintaan terhadap tanah air. (TK)

USAI TANDATANGANI PKS DENGAN BIG, ANRI TERIMA ARSIP DARI ALWI SHIHAB, SOEMARNO, BIG, KEMENKUMHAM, PGN, BKKBN, DAN PERSIS



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Sestama BIG (kiri), Budhy Abdono Soenhadi dan Sestama ANRI (kanan), Gina Masudah Husni

JAKARTA, ARSIP - Pada 29 Januari 2013 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang semula bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dilanjutkan dengan acara penyerahan arsip dari beberapa lembaga, perusahaan, organisasi masyarakat dan perseorangan kepada ANRI yang memiliki nilai guna kesejarahan (*historical value*).

Penandatanganan kerjasama antara ANRI dengan BIG dilakukan oleh Sekretaris Utama (Sestama) ANRI, Gina Masudah Husni dan Sestama BIG, Budhy Abdono Soenhadi. Ruang lingkup kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan, khususnya terkait dengan pengelolaan arsip geospasial, mencakup penyelamatan dan pelestarian arsip

informasi geospasial; pembinaan penyelenggaraan kearsipan dinamis; peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan; dan pelaksanaan kegiatan lain yang dipandang perlu.

Penyerahan arsip yang dilaksanakan usai penandatanganan PKS menjadi suatu catatan penting bagi ANRI dalam penambahan khazanah arsip yang disimpan dan dilestarikan di lembaga kearsipan nasional ini. Ada tujuh komponen bangsa yang sangat mengerti akan arti pentingnya arsip dan memiliki perhatian yang tinggi terhadap penyelamatan arsip. Tujuh komponen bangsa itu terdiri atas tiga instansi pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM, BIG, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); satu perusahaan yaitu PT. Perusahaan Gas Negara; satu Organisasi Masyarakat yaitu PP Persatuan

Islam (PERSIS), dan dua tokoh nasional yaitu Prof. Dr. Alwi Shihab (Mantan Menteri Luar Negeri) dan dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Mantan Gubernur DKI dan Menteri Dalam Negeri) kepada ANRI sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian untuk menyelamatkan arsip yang memiliki nilai kesejarahan dan pertanggungjawaban nasional. Nantinya publik dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan, masyarakat dan kemaslahatan bangsa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyerahan arsip dari beberapa lembaga lembaga negara, lembaga pemerintahan dan perusahaan, organisasi masyarakat dan perseorangan ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Usai acara serah terima arsip, Mantan Menteri Luar Negeri yang juga pernah mengajar di Harvard University ini melaksanakan wawancara sejarah lisan. Begitu pula dengan Ketua Umum PERSIS, Prof. Dr KH Maman Abdurahman yang menyerahkan langsung arsipnya ke ANRI, juga melaksanakan wawancara sejarah lisan.

Penyerahan arsip dari beberapa lembaga, perusahaan, organisasi masyarakat dan perseorangan dan pelaksanaan wawancara sejarah lisan ini tentunya akan menambah khazanah arsip yang disimpan dan dilestarikan di ANRI. (TK)

TINGKATKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN YANG LEBIH BAIK, TNI DAN ANRI TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN



Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Panglima TNI (kiri) dan Kepala ANRI (kanan)

JAKARTA, ARSIP - Bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada 30 Januari 2013 Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agus Suhartono dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Asichin menandatangani nota kesepahaman mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan TNI. Adapun ruang pelestarian arsip lingkup nota kesepahaman meliputi, pembinaan sistem kearsipan TNI sesuai dengan standar dan kaidah kearsipan nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia kearsipan, penyelamatan arsip terjaga dan arsip

statis, pemanfaatan arsip statis TNI, apresiasi, sosialisasi, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang kearsipan.

Pada kesempatan itu, Kepala ANRI, M. Asichin menyampaikan rasa optimismenya bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan TNI ke depan dapat berjalan dengan baik. "Sebagai dasar rasa optimisme saya, Bapak Panglima mengagendakan acara penandatanganan nota kesepahaman di forum Rapimnas TNI. Ini sebagai modal awal terwujudnya penyelenggaraan kearsipan di lingkungan TNI yang lebih baik. Sebagai momentum bagi kita untuk

saling berkoordinasi dan bersinergi sesuai dengan fungsi dan kapasitas kita masing-masing," ujar Kepala ANRI saat memberikan sambutannya di hadapan para peserta Rapimnas TNI.

Dalam amanatnya, Panglima TNI mengutarakan pentingnya peranan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Melalui arsip yang terpeliharabai, dapat mengungkapkan perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa. Memori tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang," jelasnya. (sa)

ANRI PERKUAT KERJA SAMA KEARSIPAN DENGAN UGM



Kepala ANRI, M. Asichin (kiri) & Wakil Rektor Bid. Kerja Sama dan Alumni UGM, Prof. Ir Dwikorita Karnati, M Sc Ph D (kanan)

YOGYAKARTA, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Universitas Gajah Mada (UGM) perkuat kerja sama bidang kearsipan dengan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama pada Selasa 12 Februari 2012, di Ruang Multimedia, Lantai 3 Sayap Utara Gedung Pusat UGM, Yogyakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala ANRI, M. Asichin, SH., M.Hum serta Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni, Prof Ir. Dwikorita Karnati, M.Sc, Ph D.

Nota Kesepahaman Bersama mencakup pengembangan pendidikan

bidang ilmu kearsipan serta penelitian dan pengembangan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan. Kepala ANRI dalam sambutannya menyatakan bahwa tuntutan zaman menghendaki adanya perubahan pengelolaan kelembagaan dan pengembangan keilmuan. Khusus SDM bidang kearsipan perlu ditingkatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. "ANRI sangat memperhatikan SDM bidang kearsipan untuk meningkatkan

kualitas para pegawai melalui pendidikan lanjutan," tegasnya.

Sebelumnya ANRI dan UGM telah melakukan kerja sama dengan berdirinya Diploma III Kearsipan. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dalam kesempatan ini pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada ANRI yang telah memberikan perhatian dan kepercayaan kepada UGM untuk pengembangan pendidikan bidang kearsipan. "Nampak ada peluang dikembangkannya program studi kearsipan ke jenjang yang lebih tinggi," tambahnya. Kepala ANRI berharap sampai jenjang S2 bahkan S3 dalam Program Studi Ilmu Kearsipan.

Kepala ANRI didampingi oleh Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Mustari Irawan serta Prof. Dr. Noerhadi Magetsari, Prof. Theo Thomassen, Dosen Universiteit van Amsterdam. Nampak hadir pula dalam acara ini Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM, Prof. Dr. Bambang Purwanto, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DIY, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Jawa Tengah, Kepala Kantor Arsip UGM dan beberapa pimpinan terkait di lingkungan UGM. (spy)

ANRI SEPAKATI PKS DENGAN PP MUHAMMADIYAH



Sekretaris Utama ANRI (kedua dari kanan) dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah (kedua dari kiri) menandatangani PKS disaksikan oleh Kepala ANRI, M. Asichin (kanan) dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Perkaderan dan Pembinaan Ortom Periode 2010-2015 Dahlan Rais

YOGYAKARTA, ARSIP - Menindaklanjuti Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan PP Muhammadiyah pada 16 November 2012 silam, Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, H. Agung Danarto pada 12 Februari 2013 menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan di gedung PP Muhammadiyah, Lantai 3, jalan Cik Ditiro, nomor 23, Yogyakarta.

PKS yang disepakati ANRI dan PP Muhammadiyah ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam upaya penyelenggaraan kearsipan nasional. Adapun ruang lingkup PKS ini meliputi, pembinaan sistem pengelolaan arsip, mencakup



Pameran arsip di lobi kantor PP Muhammadiyah

pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, pedoman pengelolaan arsip, pembentukan Arsip Perguruan Tinggi Muhammadiyah; akuisisi arsip, mencakup penyelamatan arsip statis dan pelaksanaan wawancara sejarah lisan tokoh PP Muhammadiyah; preservasi arsip, mencakup kegiatan digitalisasi dan restorasi arsip; akses arsip; dan hal lain yang disepakati bersama.

Dalam sambutannya, Kepala ANRI M. Asichin mengungkapkan bahwa PP Muhammadiyah telah mempunyai kepedulian besar terhadap penyelamatan arsip yang bernilai sejarah sebagai bukti pertanggungjawaban nasional untuk generasi masa kini dan masa mendatang. "Saya berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi peningkatan penyelenggaraan kearsipan khususnya, di lingkungan PP Muhammadiyah," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Perkaderan dan Pembinaan Ortom periode 2010 – 2015, Dahlan Rais dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKS antara ANRI dengan PP Muhammadiyah harus dipotimalkan pelaksanaannya. "Kita harus mengetahui bagaimana mengelola arsip yang baik, menyimpannya dan juga harus aling mengingatkan agar tidak melupakan PKS ini, sehingga ke depannya bisa kita tindak lanjuti bersama," terangnya. Beliau pun menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak ANRI yang siap membantu PP Muhammadiyah khususnya dalam bidang pengelolaan arsip.

Selain itu, dalam waktu yang sama diadakan pameran arsip di lobi kantor PP Muhammadiyah dan bedah buku berjudul *Muhammadiyah Di Hadapan Saksi Sejarah* terbitan Majelis Pustaka Informasi PP Muhammadiyah, Cetakan Pertama Februari 2012.

AJANG LOMBA KREATIVITAS DAN APRESIASI DIORAMA SEJARAH PERJALANAN BANGSA BANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN PELAJAR



Suasana lomba mewarnai tingkat TK

JAKARTA, ARSIP - Sabtu, 9 Maret 2013. Ratusan pelajar Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membanjiri Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam ajang Lomba Kreativitas dan Apresiasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dalam bentuk lomba mewarnai, menggambar dan cerdas cermat.

Acara yang digelar 7 s.d. 9 Maret 2013 ini bertujuan untuk membangun semangat kebangsaan para Pelajar dan akan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, demikian ungkap Kepala ANRI, M. Asichin. Diharapkan melalui ajang kreativitas

dan apresiasi ini, para pelajar lebih mengenal sejarah bangsanya dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan, pendahulunya. Hadir memeriahkan acara, Bapak Alwi Shahab dengan dongeng Sejarah Jakarta dan Pandu Wijaya ilustrator dari kota Apel, Malang.

Keluar sebagai pemenang I, II, dan III Lomba Mewarnai : Tania Tanujaya (TK Kemuning), Fajar Prasetya (TK Gema Illahi), dan Arinnisa Alhumairah Azzahra (TK Kenari). Pemenang I, II dan III Lomba Menggambar : Ela Sakuntala (SD Tarakanita Tangerang), Clara Widyatna (SD Madrasah

Pembangunan), dan Dyssa Chysilla Cathlin (SD Slipi 07 Pagi). Pemenang I, II, III, dan IV Lomba Cerdas Cermat : SMP-IT Insan Harapan Tangerang, SMP-IT Darul Abidin, SMP Azhari Islamic School Lebak Bulus, dan SMPN 212 Jakarta Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, dan sekolah yang telah berpartisipasi dalam lomba, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam ajang kreativitas dan apresiasi ini,” ungkap M. Asichin setelah memberikan penghargaan kepada para pemenang. (ER)

MENUJU LEMBAGA KEARSIPAN BERKELAS DUNIA, ANRI JALIN KERJASAMA DENGAN INSTITUSI LUAR NEGERI



Kepala ANRI dan Kepala Arsip Nasional Serbia saling bertukar naskah perjanjian kerja sama.

JAKARTA, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjalin kerja sama dengan institusi luar negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen, pemanfaatan dan pengelolaan arsip di Indonesia pada umumnya dan di ANRI pada khususnya. Institusi luar negeri tersebut antara lain adalah *Nationaal Archief* (Arsip Nasional Belanda), *The Archives Jugoslavije of Republic of Serbia* (Arsip Nasional Serbia), *Koninklijke Instituut voor Taal, Land, – en Volkenkunde/KITLV* (Lembaga Penelitian Kerajaan Belanda untuk Daerah Tropis), dan *Universiteit van Amsterdam* (Universitas Amsterdam). Acara ini berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu malam (13/1).



Suasana Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dalam rangka Penyelarasan Program Pembinaan Kearsipan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama

Kerja sama antara ANRI dan Arsip Nasional Belanda menekankan pada peningkatan kerja sama dalam lingkup warisan budaya, dokumentasi sejarah, manajemen kearsipan, serta

pendidikan dan pelatihan dalam bidang kearsipan. Pihak ANRI diwakili oleh M. Asichin selaku Kepala ANRI dan dari pihak Arsip Nasional Belanda diwakili oleh Ted Stimmer. Hadir dalam penandatanganan kerjasama ini, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Tjeerd F. de Zwaan.

ANRI menggandeng Arsip Nasional Serbia dalam upaya meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan arsip kedua negara. Sebagaimana diketahui, hubungan baik antara Indonesia dan Yugoslavia sudah berlangsung sejak lama, ketika keduanya tergabung dalam Gerakan



Penganugerahan sertifikat Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) kepada Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa (DSPB) ANRI. MURI memberikan penghargaan kepada DSPB ANRI sebagai diorama yang menggunakan arsip terbanyak. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua MURI, Jaya Suprana kepada Kepala ANRI, M. Asichin.

Non Blok. Pihak Serbia diwakili oleh Kepala Arsip Nasional Serbia, Miladin Milosevic. Penandatanganan kerja sama disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Serbia, Semuel Samson dan Duta Besar Serbia untuk RI, Zoran Kazazovic.

Selain bekerja sama dengan lembaga kearsipan mancanegara, ANRI juga menandatangani kerja sama dengan KITLV yang diwakili oleh Roger Toll. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan publikasi terhadap khazanah arsip. Sementara itu, ANRI juga menggandeng Universiteit van Amsterdam (UvA) dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dan ilmu kearsipan melalui pendidikan formal, pascasarjana, dan doktoral. Pihak UvA dalam hal ini diwakili oleh Theo Tomassen.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dalam rangka Penyelarasan Program Pembinaan Kearsipan yang diikuti oleh 500 orang peserta yang terdiri



Pemberian sertifikat ISO 9001:2008 mengenai Layanan Jasa Kearsipan kepada Pusat Jasa Kearsipan ANRI

dari Kepala Lembaga Kearsipan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai wilayah di Indonesia. "Tujuan Rakorwil ini adalah untuk menyelaraskan program pembinaan kearsipan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pemahaman tentang pengelolaan arsip yang bekesinambungan," jelas M. Asichin.

Selain itu dilaksanakan penganugerahan sertifikat Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) kepada

Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa (DSPB) ANRI. MURI memberikan penghargaan kepada DSPB ANRI sebagai diorama yang menggunakan arsip terbanyak. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua MURI, Jaya Suprana kepada Kepala ANRI.

Dalam kesempatan ini dilakukan juga pemberian sertifikat ISO kepada Pusat Jasa Kearsipan ANRI dan deklarasi zona integritas yang menyatakan bahwa ANRI adalah organisasi bebas korupsi. (HMS)

KEPPRES PEMBERIAN GELAR PAHLAWAN PROKLAMATOR KINI TERSIMPAN DI ANRI

JAKARTA, ARSIP - Dua ribu sembilan ratus berkas dari 111 box atau 167 jilid Arsip Gelar tahun 1963 sampai dengan tahun 1998 serta 1 buah Bintang Mahaputra pada Selasa, 19 Maret 2013, di Ruang Rapat Gedung Utama Lt.3 Kementerian Sekretariat Negara RI, diserahkan secara simbolis ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg), Lambok V. Nahattands kepada Kepala ANRI, M. Asichin. yang disaksikan oleh pejabat eselon I, II dan III terkait di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI dan ANRI.

Dalam sambutannya, Lambok menghimbau jajarannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja kegiatan kelembagaan sehingga dapat memberdayakan arsip sebagai sumber informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sehingga dalam pengelolaan arsip semakin berkualitas, guna menyajikan arsip yang semakin autentik, semakin reliable, dan semakin kredibel.

Lebih lanjut Lambok menyampaikan bahwa penyerahan arsip gelar dan tanda kehormatan dari 1963 s.d. 1998 ini merupakan kumpulan arsip gelar dan tanda kehormatan yang memuat informasi lengkap mengenai kronologis pemberian penghargaan dari



Kepala ANRI menerima penyerahan arsip secara simbolis dari Sesmen Kementerian Setneg

Presiden kepada seseorang ataupun institusi dengan berbagai macam syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan dinamika dan kondisi sosial, ekonomi dan politik saat itu. Adapun arsip yang diserahkan secara simbolis dalam acara tersebut antara lain mencakup Keputusan Presiden Nomor 86/TK/1986 tentang Pemberian Gelar Pahlawan Proklamator untuk Ir. Soekarno dan Moh. Hatta dan Keputusan Presiden Nomor 035/TK/Tahun 1972 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Kelas I kepada Dr. H. Moh. Hatta.

Sementara itu, M Asichin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja

sama Kemsetneg semoga terus berlanjut dalam melaksanakan dan menyerahkan semua arsip-arsip yang bernilai strategis ke ANRI untuk terus dilestarikan demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara baik untuk kenangan masa lalu ataupun untuk kepentingan masa depan di Indonesia. M. Asichin menambahkan, dalam perkembangan di bidang kearsipan, benda-benda atau dokumen-dokumen yang bernilai strategis yang merupakan bagian yang melengkapi arsip, ANRI siap untuk menyimpan dan menjaganya dengan baik. (Fir)

ANRI JALIN KERJA SAMA DENGAN REPUBLIKA



Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara ANRI dengan REPUBLIKA

JAKARTA, ARSIP - 21 Maret 2013, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani nota kesepahaman bersama dengan PT. Republika Media Mandiri (REPUBLIKA) dalam bidang kearsipan dan pemberitaan. ANRI diwakili oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip, Mustari Irawan dan Nasihin Masha selaku pemimpin redaksi *REPUBLIKA* menandatangani nota kesepahaman tersebut. Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan di PT. Republika Media Mandiri, Warung

Buncit Raya Nomor 37, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan sebagai upaya penyelenggaraan kearsipan nasional dan pemberitaan yang meliputi, pembinaan sistem kearsipan, pertukaran informasi dan bahan berita, publikasi dan sosialisasi kearsipan serta pengembangan sumber daya manusia.

Terkait dengan pemberitaan,

Mustari Irawan mengatakan bahwa arsip dapat dijadikan sumber informasi. "Tentu saja pada dasarnya arsip itu informasi, jadi yang kami miliki itu kaya dengan sumber informasi, Kalau kita sebagai seorang peneliti atau penelusur informasi, pasti bisa mencari informasi yang diinginkan,"ujarnya.

Selepas penandatanganan, pihak ANRI dengan *REPUBLIKA* bertukar cinderamata, dilanjutkan dengan diskusi ringan seputar kearsipan. (sa)

HARI JADI KE-99 KOTA SUKABUMI, ANRI BERIKAN “KADO SPESIAL” CITRA DAERAH KOTA SUKABUMI DALAM ARSIP

SUKABUMI, ARSIP - 1 April 2013 bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi ke-99 Kota Sukabumi yang mengusung tema “Melalui Peringatan Hari Jadi Kota Sukabumi Ke-99 Tahun 2013, Kita Optimalkan Kinerja dan Kebersamaan untuk Mewujudkan Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan Berlandaskan Iman dan Takwa”, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan “kado spesial” berupa buku penerbitan naskah sumber arsip Citra Daerah Kota Sukabumi dalam Arsip kepada Pemerintah Kota Sukabumi. Naskah sumber tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Dini Saraswati kepada Wali Kota Sukabumi, Mokh. Muslikh Abdussyukur dan Ketua Dewan



Penyerahan Citra Daerah Kota Sukabumi oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Dini Saraswati kepada Walikota Sukabumi Mokh. Muslikh Abdussyukur

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, Aep Saepurahman.

Dalam sambutannya pada acara sidangparipurna DPRDKotaSukabumi, Dini Saraswati mengutarakan pentingnya meningkatkan pemahaman

nilai-nilai budaya kepada masyarakat dan generasi muda. “Khazanah arsip mengenai kota sukabumi yang tersimpan di ANRI, perlu diinformasikan kembali kepada masyarakat Sukabumi melalui program ANRI yang disebut dengan Citra Daerah. Program citra daerah pada dasarnya merupakan upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam arsip. Program Citra Daerah, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan generasi muda terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di luar, memupuk kebanggaan terhadap cinta tanah air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, memupuk rasa persatuan, dan memperkokoh kesatuan berbangsa,” ungkapnya. (Sa)



**UCAPAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA
DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA
KEPADA YANG TERHORMAT**

H. M. Asichin, S.H., M.Hum.

**ATAS DEDIKASI BELIAU
SELAKU KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2010-MARET 2013**

ANRI PROMOTOR PENGAJUAN ARSIP KAA MENJADI MEMORY OF THE WORLD



Foto bersama Plt. Kepala ANRI dengan Nara Sumber dan Peserta *Workshop*

JAKARTA, ARSIP - Bertempat di Arion Swiss-belhotel, Selasa, 23 April 2013, Arsip Nasional Republik Indonesia menggelar (ANRI) *Workshop* Pengajuan Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai *Memory of The World* (MOW).

Acara yang mengusung tema “Strategi dan Teknik Penominasian Arsip KAA sebagai MoW ini menghadirkan Narasumber dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Edi Sedyawati dan Kepala Lembaga Sensor Film, Dr. Mukhlis PaEni. Kiat yang harus dilakukan agar arsip KAA dapat mendapat pengakuan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai MOW menurut Edi Sedyawati bahwa ANRI harus dapat membuktikan arsip-

arsip tersebut tersedia dan terawat dengan baik serta dialihmediakan sehingga mudah diakses. Lain halnya menurut Mukhlis PaEni yang mengutarakan bahwa, pengakuan UNESCO tersebut memerlukan dua hal utama yakni arsip KAA harus unik dan memiliki nilai universal. Unik karena tak ada duanya serta universal karena KAA telah memberi arti penting. Tidak hanya dikenang dalam sejarah nasional Indonesia, tetapi dalam sejarah dunia, khususnya belahan Asia Afrika. Dengan demikian, KAA tidak hanya simpul ingatan kolektif nasional bangsa Indonesia, namun lebih jauh KAA merupakan *Memory of The World*.

Sementara itu dalam sambutannya, Plt. Kepala ANRI, Gina Masudah

Husni, menyampaikan bahwa ANRI sebagai promotor mengharapkan kepada narasumber dan peserta agar dapat membantu pengajuan arsip KAA tersebut sebagai MOW.

Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Prof. Arief Rahman, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro, anggota MOW Indonesia yang juga sejarawan Taufik Abdullah, Asvi Warman Adam, serta praktisi dan akademisi Jakarta ini dilaksanakan serah terima arsip KAA 1955 dari PT. Telkom yang diharapkan dapat melengkapi khazanah arsip KAA khususnya dalam pengajuan sebagai MOW. (er)

PUSAT JASA KEARSIPAN

Solusi Problema Kearsipan Anda



**Anda Mempunyai Problema Kearsipan,
Kami Siap Memberi Solusi Cepat dan Akurat:**



- **Membangun/menyempurnakan Manual Sistem
Pengelolaan Arsip/Dokumen Berbasis ISO 15489:
Records Management**
- **Menyusun Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip (JRA)**
- **Membangun Aplikasi Sistem Informasi**
- **Pengelolaan Arsip/Dokumen dan Aplikasi Otomasi Kearsipan**
- **Merancang dan Mengimplementasikan Program Arsip Vital**
- **Menata Arsip**
- **Merawat Arsip (Laminasi, Fumigasi, Penghilang Asam)**
- **Reproduksi dan/atau Alih Media**
- **Memberikan Layanan Penyimpanan Arsip Secara Aman
dengan Fasilitas Pengaturan Suhu dan Kelembaban
Full 24 Jam setiap hari, serta Layanan Akses Arsip
yang Mudah.**



Kami siap hadir untuk memperkenalkan produk jasa kearsipan yang Anda perlukan. Hubungi kami di:

**PUSAT JASA KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Ampera Raya No. 7 Jakarta Selatan. 12560
Telp. : 021 7805851 ext 409
Fax : 021 7802043
Email : pusat.jasa@gmail.com



ANRI
Arsip Nasional Republik Indonesia

SOSIALISASI KEARSIPAN MELALUI MOBIL LAYANAN MASYARAKAT SADAR ARSIP

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap arsip, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Sosialisasi Kearsipan melalui Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah, universitas, tempat-tempat umum, dan lain-lain.

Dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Kearsipan melalui Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip, para pelajar, mahasiswa atau pun masyarakat umum diberikan penjelasan singkat mengenai kelembagaan ANRI serta keberadaan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. Setelah itu dilaksanakan pemutaran film dokumenter yang bersumber pada khazanah arsip ANRI, seperti film Usaha-Usaha Mempertahankan Kemerdekaan dan Kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak jarang dalam rangkaian kegiatan ini diberikan pemahaman dan langkah-langkah memperbaiki arsip konvensional/kertas dengan cara yang sederhana, mudah dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.



Bagi pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat yang berminat untuk dikunjungi Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip, dapat menghubungi Bagian Humas ANRI, Jln. Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 7805851 ext.404/261, Fax. (021) 7810280-7805812

GRATIS! TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN

